



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS KINERJA LKM-A “HARAPAN BUNDO” DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDEESAAN KEL. LUBUK  
LINTAH KEC. KURANJI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**



**FAUZIAH  
07114020**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

ANALISIS KINERJA LKM-A “HARAPAN BUNDO” DALAM MENGELOLA DANA  
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN KEL.LUBUK LINTAH KEC.KURANJI KOTA PADANG

OLEH

FAUZIAH NUR, ML  
07 114 020



FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2011



**ANALISIS KINERJA LKM-A “HARAPAN BUNDO” DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN KEL.LUBUK  
LINTAH KEC.KURANJI KOTA PADANG**

**Oleh**

**FAUZIAH NUR, ML**  
**07 114 020**



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**ANALISIS KINERJA LKM-A “HARAPAN BUNDO” DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN KEL.LUBUK  
LINTAH KEC.KURANJI KOTA PADANG**

Oleh

**FAUZIAH NUR, ML**  
07 114 020

**SKRIPSI  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

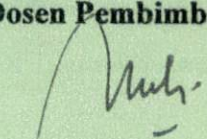
**ANALISIS KINERJA LKM-A "HARAPAN BUNDO" DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN KEL.LUBUK  
LINTAH KEC.KURANJI KOTA PADANG**

Oleh

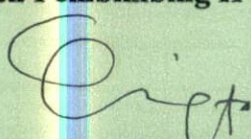
**FAUZIAH NUR, ML**  
07 114 020

**MENYETUJUI :**

**Dosen Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc**  
NIP : 19641031198932001

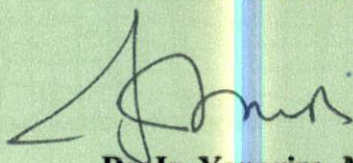
**Dosen Pembimbing II**

  
**Cipta Budiman SSI, MM**  
NIP : 132 315 389

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**

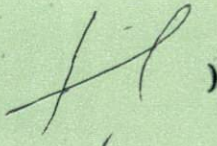
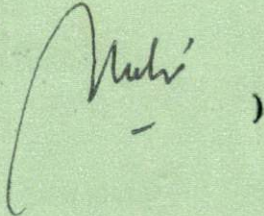
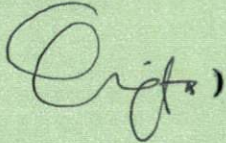
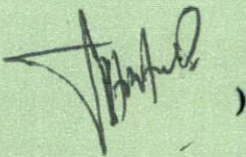
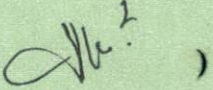
  
  
**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc.**  
NIP. 19650505 199103 1 003

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Fakultas Pertanian**

  
**Dr. Ir. Yonariza, M.Sc**  
NIP.195312161980031004



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang pada Tanggal 22 Juli 2011

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Ir.M.Refdinal, M.Si	(  )	Ketua
2.	Prof.Dr.Ir.Melinda Noer, M.Sc	(  )	Sekretaris
3.	Cipta Budiman SSi, MM	(  )	Anggota
4.	Syofyan Fairuzi, STP, M.Si	(  )	Anggota
5.	Muhammad Hendri SP, MM	(  )	Anggota



## السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan penyejuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertaqwa. Bagi mereka berita gembira didalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, demikian itulah kemenangan yang agung" (Q.S. Yunus ayat 57, 62-64).

Saya ucapkan Alhamdulillah Rabbil' alamin.

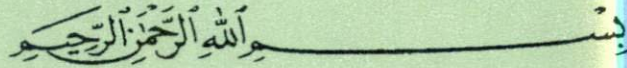
Kupersembahkan Karyaku ini kepada Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Mhd. Rum Lubis, dan ibunda Nur Zakiyah Lubis Kakanda Rizky SPd, Kakanda Ridwan S.Kom, kakanda Riyadh SE, beserta keluarga besar "LUBIS" yang saya sayangi.

"Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung"  
(Albert Einstein).

Besarnya kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang Papa dan Mama lakukan untuk fuzi tidak akan cukup hanya dengan kata terimakasih, sebagai seorang anak fuzi hanya dapat meminta pada Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang untuk membalas semua perjuangan dan pengorbanan itu dengan cinta dan kasihNYA pada Mama dan Papa. Beserta keluarga besar fuzi, kak Rizky, bang Iwan, bang Riyad, dan adek-adek fuzi terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini. Adek Ina dan yusuf baik-baik kuliahnya. Untuk teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan SOSEK 07 terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan ikatan ukhuwah diantara kita dapat terus terjaga. Mudah-mudahan Allah SWT akan mempertemukan kita lagi dalam suatu kondisi dimana kita menjadi manusia-manusia dan hamba yang baik kualitas ketaqwaan, hartawan, dermawan, cendikiawan dan bijaksana.

"Kaum muda yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu memimpin sesuatu yang tak pernah diimpikan siapa pun" (Jhon Efcanady).

## KATA PENGANTAR



Kalimat puji dan syukur penulis ucapkan hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Hamba-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : “ **Analisis Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam Mengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Kota Padang**”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Prof.Dr.Ir.Melinda Noer, M.Sc.** dan Bapak **Cipta Budiman Ssi,MM** sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberi bimbingan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi, Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi dan Fakultas Pertanian, seluruh karyawan serta rekan-rekan penulis di Fakultas Pertanian. Penghargaan dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak **Ir.M.Refdinal, M.Si**, Bapak **Syofyan Fairuzi STP. M.Si** dan Bapak **Muhammad Hendri SP. MM** selaku dosen penguji dan dosen undangan atas masukan, saran dan penilaian yang telah diberikan dalam ujian dan seminar yang telah penulis laksanakan.

Buat Bapak **Yulisman Sp**, selaku ketua Gapoktan Harapan Bundo, Ibu **Lasmita Sari, Desmita** selaku Pengelola LKM-A Harapan Bundo, Bapak **Syamsurizal** sebagai Manajer LKM-A Harapan Bundo, dan kepada Bapak **Andi SP** sebagai PMT kota Padang, terima kasih yang tak terhingga penulis rangkai dalam kalimat ini, kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu menjadikan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT menjadikannya suatu amal ibadah disisi-Nya.

Selayaknya karya manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari semua pihak agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki dimasa mendatang. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengannya.

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Program Bantuan Langsung Masyarakat PUAP .....	7
2.2 Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya .....	10
2.3 Penumbuhan LKM-A .....	13
2.4 Tinjauan tentang kredit Pertanian .....	21
2.5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).....	23
2.6 Konsep Penilaian Kinerja.....	25
2.7 Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.8 Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.3 Teknik Pengambilan Responden dan <i>Key Informan</i> .....	31

3.4 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.5 Fokus Penelitian .....	34
3.6 Analisa Data .....	37
3.7 Defenisi Operasional .....	42
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja LKM-A Harapan Bundo.....</b>	<b>45</b>
4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji..	45
4.1.2 Penduduk dan Potensi Kelurahan Lubuk Lintah.....	45
<b>4.2 Profil LKM-A Harapan Bundo.....</b>	<b>46</b>
4.2.1 Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Harapan Bundo .....	46
4.2.2 Organisasi .....	47
4.2.3 Permodalan.....	51
4.2.4 Keanggotaan.....	52
4.2.5 Usaha, Produk dan Perkembangannya .....	54
<b>4.3 Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo .....</b>	<b>55</b>
4.3.1 Rencana, Realisasi Pencairan, Penggunaan, dan Sistem Pengembalian Dana BLM-PUAP.....	55
4.3.2 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo .....	61
4.3.3 Sistem dan Persyaratan Anggota untuk Meminjam .....	63
4.3.4 Proses Dana Bergulir Dalam Kelompok .....	64
4.3.5 Fungsi Penyelia Mitra Tani dan Penyuluh Pendamping Lapangan Dalam Pengelolaan Dana BLM-PUAP .....	66
<b>4.4 Analisa Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam Mengelola Dana BLM-PUAP.....</b>	<b>67</b>
4.4.1 Permodalan.....	68
4.4.2 Kualitas Aktiva Produktif.....	73
4.4.3 Manajemen .....	74
4.4.4 Efisiensi.....	76

4.4.5 Likuiditas.....	77
4.4.6 Kemandirian dan Pertumbuhan.....	79
4.4.7 Jati Diri LKM-A.....	80
4.4.8 Tingkat Kesehatan LKM-A Harapan Bundo .....	82
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b><u>Halaman</u></b>
1. Komponen Modal LKM-A Harapan Bundo .....	51
2. Persentase Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Usaha.....	52
3. Perkembangan Usaha Pembiayaan LKM-A Harapan Bundo .....	54

## DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Rincian Responden.....	32
2. Rincian <i>Key Informan</i> .....	33
3. Jenis Data, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data .....	34
4. Aspek dan Bobot Penilaian Kinerja LKM-A .....	38
5. Penggolongan Tingkat Kesehatan LKM-A.....	38
6. Rumus Perhitungan Rasio-rasio pada Aspek Permodalan .....	39
7. Rumus Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif.....	39
8. Rumus Perhitungan Aspek Manajemen .....	40
9. Rumus Perhitungan Aspek Efisiensi .....	40
10. Rumus Perhitungan Aspek Likuiditas.....	41
11. Rumus Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.....	41
12. Rumus Perhitungan Aspek Jatidiri LKM-A.....	42
13. Aspek yang diamati untuk menilai tatakelola Gapoktan PUAP .....	50
14. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Harapan Bundo .....	56
15. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP .....	57
16. Rencana dan realisasi dana berdasarkan jenis usaha.....	58
17. Pemanfaatan Dana oleh anggota .....	59
18. Syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota LKM-A.....	63
19. Pertimbangan, pelaksanaan dan kendala perguliran dana BLM PUAP .....	64
20. Tugas PMT di LKM-A Harapan Bundo .....	66
21. Komponen dan jumlah modal sendiri dan total aset .....	69
22. Perhitungan Modal tertimbang.....	71
23. Hasil Penilaian Aspek Manajemen .....	76
24. Dana yang diterima .....	78
25. Hasil Penilaian Kinerja LKM-A Harapan Bundo .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP Tahun 2009 .....	93
2. Rincian Kelompok Tani penerima PUAP .....	94
3. Perkembangan dana BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo .....	95
4. Rencana dan Realisasi Pecairan dan Penggunaan dana BLM-PUAP .....	96
5. Data Rekapitulasi perkembangan dana BLM-PUAP kota Padang .....	97
6. Identitas dan Aktivitas Responden anggota LKM-A .....	98
7. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A .....	99
8. Struktur Pengelola LKM-A Harapan Bundo.....	109
9. Struktur Organisasi Gapoktan Harapan Bundo .....	110
10. Daftar Hasil Pertanyaan mengenai Aspek Manajemen.....	111
11. Neraca LKM-A Harapan Bundo .....	117
12. Keadaan modal LKM-A Harapan Bundo.....	117
13. Jumlah Anggota berdasarkan jenis usaha.....	118
14. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Harapan bundo .....	119
15. Rencana usaha kelompok Saiyo Sakato .....	120
16. Rencana usaha kelompok Kandang Batu Sakato .....	121
17. Rencana usaha kelompok Kampung Kalawi Timur.....	122
18. Surat Rekomendasi.....	123
19. Data permohonan pembiayaan anggota LKM-A .....	124
20. Surat Persetujuan.....	125
21. Contoh Rencana Usaha Anggota.....	126
22. Contoh Lampiran Rencana Usaha Anggota .....	127
23. Laporan Rugi/Laba LKM-A Harapan Bundo .....	128
24. Posisi kekayaan /Modal bersih LKM-A Harapan Bundo.....	129
25. Laporan Sisa Hasil Usaha LKM-A Harapan Bundo .....	130
26. Proses Pencairan dana BLM-PUAP .....	131

27. Penjelasan dan Keterangan bobot penilaian kinerja LKM-A.....	132
28. Matriks Data Set Penelitian.....	141

**ANALISIS KINERJA LKM-A “HARAPAN BUNDO” DALAM  
MENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN KELURAHAN  
LUBUK LINTAH KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo; (2) menganalisa kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan *key informan* dalam penelitian ini yang terdiri dari : i) ketua Gapoktan Harapan Bundo; ii) manajer umum LKM-A Harapan bundo; iii) Penyelia Mitra Tani (PMT) kota Padang; iv) Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) daerah Kel.Lubuk Lintah; v) staf Badan Penyuluh Pertanian (BPP) untuk program BLM-PUAP. Data primer dan data sekunder juga diperoleh dari responden yang terdiri dari : a) pengurus Gapoktan Harapan Bundo; b) pengelola LKM-A Harapan Bundo; dan c) anggota LKM-A Harapan Bundo sebagai responden. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo menggunakan alat ukur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo telah merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, dan pihak LKM-A Harapan Bundo juga menerapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan lokal yaitu : 1) pembentukan Badan Penyelamat Keuangan (BPK); 2) adanya surat persetujuan dari pihak keluarga anggota untuk meminjam di LKM-A Harapan Bundo; dan 3) surat persetujuan dari ketua Poktan agar anggota diizinkan meminjam di LKM-A Harapan Bundo. Perbedaan antara waktu rencana dan realisasi sebagai akibat dari keterlambatan pencairan dana ke rekening Gapoktan. Pertimbangan terhadap aspek perilaku sosial calon peminjam. Perkembangan usaha pembiayaan dan jumlah anggota yang dibiayai LKM-A Harapan Bundo meningkat dengan adanya dana BLM-PUAP. Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana program BLM-PUAP berpredikat “**cukup sehat**” yang berarti LKM-A Harapan Bundo sudah cukup baik dalam pengelolaan dana bantuan modal untuk petani.LKM-A Harapan Bundo memiliki kelemahan dan skor terendah pada aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri LKM-A.

LKM-A Harapan Bundo disarankan untuk memperbanyak jenis usaha yang dibiayai, mempertegas aturan terhadap pengelola LKM-A, dan meningkatkan pengetahuan pengelola mengenai pengelolaan perbankan serta menjalankan simpanan-simpanan yang telah direncanakan.

**ANALYSIS THE FINANCIAL PERFORMANCE OF HARAPAN BUNDO  
MFI-A IN MANAGING THE DIRECT AID SOCIETY OF AGRIBUSINESS  
RURAL DEVELOPMENT FUND PROGRAM LUBUK LINTAH WARDS  
KURANJI SUBDISTRICT PADANG CITY**

**ABSTRACT**

This study investigated the financial performance of Harapan Bundo MFI-A, in managing Lubuk Lintah wards Kuranji subdistrict Padang city BLM-PUAP program funds at 2010. The purpose of this study are : (1) Describe the management of the Harapan Bundo MFI-A BLM-PUAP's funds program, (2) Analyze the performance of Harapan Bundo MFI-A in managing the BLM-PUAP funds program.

This research used descriptive method with case study design. Data collection was done by through key informants consisting of: i) Harapan Bundo farmer group's chairman; (ii) Harapan Bundo MFI-A's General Manager; iii) supervisor farmer partners (PMT); iv) Companion extension field (PPL); v) Agriculture Torch Institution staff Padang city. The primary and secondary data also obtained from respondents are : a) farmer Group Union's board; b) the manager of MFI-A; c) Harapan Bundo MFI-A Union's members. Primary and secondary data obtained and analyzed in a descriptive qualitative and quantitative, Harapan Bundo MFI-A performance assessment using a measuring tool health assessment guidelines for credit unions of the state minister of cooperatives small and medium enterprises of republik of Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008.

The research's result that the management of BLM-PUAP program funds in Harapan Bundo MFI-A has been referred to the rules established by the Ministry of Agriculture, and also implement the local policies, that is: 1) forming BPK; 2) the letter of recommendation from the family members as a condition for borrowing; and 3) the existence of Business feasibility study by the farmer Group Union's board. The difference between plan and realization is as a result from the delays of funds disbursement to the farmer Group Union's account, and consideration to the nature/character of prospective borrowers. The development financing bussiness and number of members increase with BLM-PUAP funds program. Harapan Bundo MFI-A performance in managing the BLM-PUAP funds program has "**quite healthy**" predicate, which means Harapan Bundo MFI-A is already good enough in managing the capital assistance fund, with weaknesses in aspects of liquidity, independence and growth, and MFI-A aspects of identity.

Harapan Bundo MFI-A is advised to increase the types of bussiness are financed, reinforce the rule againts for MFI-A Manager, and to increase knowledge about the management of bank managers as well as running savings that have been planned.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengalaman krisis moneter pada tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis serta andil yang sangat besar sebagai mesin penggerak, peredam gejolak dan penyangga perekonomian nasional. Berdasarkan PDB riil, sektor pertanian juga menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penyedia lapangan kerja (Departemen Pertanian, 2004).

Fenomena di atas merupakan gambaran tentang betapa strategisnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian tentu akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan dan diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Untuk memperkuat posisi sektor pertanian, maka ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan (Syukur *et al.*, 2000).

Hasil kajian Nurmanaf *et al.* (2006) menunjukkan bahwa bagi petani ternyata tidak mudah untuk mengakses modal dari lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka, akibat prosedur dan persyaratan yang ketat (di lembaga formal) maupun tingkat suku bunga yang sangat tinggi (di lembaga nonformal). Dari segi ketersediaan dana, secara teoritis sebetulnya lembaga perbankan formal memiliki potensi besar untuk pembiayaan usaha pertanian. Namun demikian, perbankan yang punya legalitas dalam menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar, ternyata belum maksimal dalam mendanai sektor pertanian yang masih relatif rendah. Sebagai gambaran, selama kurun waktu 2002-2006, pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian rata-rata 5,72 persen. Besaran pangsa sektor pertanian masih selalu di bawah sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa dunia usaha (Ashari, 2006).

Untuk mendukung ketersediaan modal petani, pemerintah sejak awal orde baru telah meluncurkan kebijakan kredit program yang diawali dengan kredit Bimas. Dari waktu ke waktu model program kredit pertanian ini telah mengalami berbagai perubahan, baik yang terkait dengan prosedur penyaluran, besaran dan

bentuk kredit, bunga kredit maupun tenggang waktu pengembalian (Taryoto, 1992). Pemerintah juga memberikan bantuan modal dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) atau dana bergulir, maupun berupa subsidi bunga. Walaupun regim pemerintah telah silih berganti, kebijakan tersebut terus dipertahankan dengan argumentasi bahwa modal merupakan faktor *crucial* dalam berusaha. Di lain pihak fasilitas kredit (terutama dengan bunga rendah) oleh pihak swasta maupun LSM dipandang masih sangat minim. Sementara itu, kebutuhan modal usahatani makin lama juga meningkat sejalan dengan makin mahalnyanya harga sarana produksi (Taryoto, 1992).

Program pembiayaan oleh pemerintah sebetulnya telah banyak dan sudah cukup lama dilakukan Departemen Pertanian melalui penerapan sejumlah program, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peralihan atau pergantian dari satu program ke program lainnya disamping memperkaya khasanah pembiayaan pertanian, beberapa diantaranya juga dimaksudkan sebagai kebijakan alternatif yang diharapkan implementasinya lebih efektif dibandingkan program sebelumnya (Iqbal dan Darwis, 2006).

Salah satu diantara kebijakan alternatif yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usahatani khususnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). Program ini terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah (Departemen Pertanian, 2009).

Program BLM-PUAP ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai organisasi petani. Meningkatkan Fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Meningkatkan kinerja-

kinerja program-program Departemen Pertanian yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memfasilitasi akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan dan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan (Departemen Pertanian, 2009).

Penyaluran dana program BLM-PUAP melalui Gapoktan yang telah memiliki LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) tersebut dilakukan dengan berbagai pola dan pendekatan di berbagai daerah sasaran program. Namun sasaran yang utama adalah peningkatan kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola manajemen dan usaha ekonomi kelompok. Dengan adanya program PUAP, pengelola Gapoktan mendapat pelatihan dan pendampingan dari Penyelia Mitra Tani (PMT), terutama dalam administrasi dan pembukuan. Sasarannya pada tahun ke-2 mulai terbangun usaha simpan pinjam dan pada tahun ke-3 dapat ditumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Sinaraya, J.F dan Agustin, N.K, 2009).

Pengembangan dan pemberdayaan LKM-A sebagai lembaga yang mengakar di masyarakat perdesaan terutama dalam penyaluran dan pengelolaan dana program BLM-PUAP, seperti yang dikemukakan Krisnamurti (2005) dalam Ashari (2006), merupakan langkah yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat. LKM-A yang mengelola modal dengan baik ada potensi yang besar untuk pembentukan modal (*Capital Formation*), sehingga LKM-A dapat mandiri untuk manajemen yang profesional oleh LKM-A yang awalnya mendapat bantuan BLM (*Grant*), untuk menyediakan dana secara kontiniu bagi usaha perekonomian di perdesaan. LKM-A yang memiliki kinerja yang baik dapat dijadikan mitra bagi pemerintah dalam pelaksanaan program pemberian kredit untuk pembangunan pertanian (Ashari, 2006).

Pemberian dana PUAP ini bertujuan menstimulasi Gapoktan dan anggotanya agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan petani yang memiliki peranan untuk pelaksana PUAP, dan diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan kinerja Gapoktan. Salah satu Gapoktan penerima dana BLM PUAP di kota Padang adalah Gapoktan Harapan Bundo, dan juga memiliki LKM-A yang diberi nama sesuai dengan nama

Gapoktan yaitu "LKM-A Harapan Bundo". Berdasarkan surat Keputusan Walikota Padang No.1007 Tanggal 23 November Tahun 2009 (Lampiran 1), Gapoktan Harapan Bundo ini salah satu Gapoktan yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik sesuai dengan panduan pembukuan yang diberikan oleh PMT sebagai pendamping LKM-A yang ditugaskan oleh Departemen Pertanian.

Pengukuran kinerja LKM-A dalam mengelola dana BLM-PUAP, dapat menunjukkan dan menggambarkan fungsi dan kerja yang dilakukan oleh LKM-A sebagai pengelola dan pelaksana dana Bantuan Langsung masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk petani, melalui Gapoktan dan LKM-A Terpilih untuk menghidupkan perekonomian anggota dan masyarakat petani (Ashari, 2006).

## 1.2 Rumusan Masalah

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan program pemerintah selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga pengelola keuangan. Sasaran dana bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tani sulit berkembang dan bahkan tidak tercapai. Oleh karena itu kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana program BLM-PUAP melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) diyakini sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. LKM-A memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal (Hendayana dan Butamam, 2008).

Idealnya, pengelolaan bantuan modal usaha ini pada intinya harus menciptakan surplus usaha dan dikelola oleh LKM-A sebagai banknya para petani dengan menggunakan prinsip; 1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (*Acceptable*); 2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*Accountable*); 3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*Profitable*); 4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*Sustainable*); dan 5) pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan

mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*) (Sumodiningrat *et al.* 2003).

Gapoktan Harapan Bundo merupakan Gapoktan yang menerima dan mengelola Dana BLM-PUAP bersama Gapoktan lainnya di Kota Padang. Menurut penilaian (PMT) Kota Padang, Gapoktan ini termasuk kategori baik dalam perkembangan Gapoktan dan sudah mendirikan LKM-A sebagai salah satu unit otonom di dalam kepengurusan Gapoktan. Pembentukan Gapoktan Harapan Bundo disahkan pada tanggal 7 Januari 2008, sedangkan LKM-A Harapan Bundo dibentuk pada tanggal 29 September tahun 2009 sebagai unit simpan pinjam dan pengelola keuangan Gapoktan Harapan Bundo. Dari perkembangan keanggotaan LKM-A pada awal pembentukan tahun 2009 keanggotaan hanya dari pengurus Gapoktan, akan tetapi setelah adanya BLM-PUAP, LKM-A dapat memiliki dan membiayai anggotanya pada tahap awal pencairan dana sebanyak 32 orang yang berasal dari 3 Poktan (Lampiran 2), dan anggota yang dibiayai bertambah selama tahun 2010 sebanyak 65 orang anggota.

Perkembangan modal usaha yang dikelola oleh LKM-A Harapan Bundo sampai akhir tahun 2010 sebanyak Rp.253.690.000,- (Lampiran 3-4). Sesuai data yang diperoleh pengelolaan dana program BLM-PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo menunjukkan perkembangan yang baik. Namun berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pengelola LKM-A Harapan Bundo, yaitu rendahnya kemampuan dan kemandirian LKM-A dalam menyediakan dana pembiayaan usaha untuk anggota.

Sesuai uraian dan kondisi diatas penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana LKM-A Harapan Bundo menyalurkan dan mengelola dana BLM-PUAP?
2. Bagaimana Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP?

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Kinerja LKM-A “Harapan Bundo” dalam Mengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kel.Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP.

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengelolaan dan perguliran dana program BLM-PUAP oleh LKM-A Harapan Bundo.
2. Menganalisa Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana program BLM-PUAP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dari berbagai pihak, ialah :

1. Pihak pemerintah dan LKM-A Harapan Bundo dapat sebagai bahan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan program-program dan aktivitas pengelolaan keuangan petani dimasa yang akan datang.
2. Untuk Peneliti dan mahasiswa, penulis berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).

Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Departemen Pertanian, 2008). Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) bertujuan untuk :

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Departemen Pertanian, 2009).

Dana program BLM-PUAP ini berasal dari APBN yang diberikan dalam bentuk hibah kepada Gapoktan. Sedangkan anggotanya yang akan menggunakan, harus meminjam, dan mengangsur pengembaliannya, dengan ketentuan yang dibuat oleh Gapoktan tersebut (Anwari Widodo, 2009). Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Gapoktan sebagai dana bergulir bagi anggota kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan penerima dana tersebut.

Sasaran pemberdayaan pertanian pengembangan usaha agribisnis perdesaan yaitu :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.

- b. Berkembangnya 10.000 Gapoktan atau poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman (Departemen Pertanian, 2009).

Indikator keberhasilan output pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah :

- a. Tersalurkannya dana BLM-PUAP kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian ; dan
- b. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (Departemen Pertanian, 2009).

Indikator keberhasilan *outcome* pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani ;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga petani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan;
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga petani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Departemen Pertanian, 2009).

Sedangkan indikator *benefit* dan *impact* PUAP antara lain :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;

- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan. (Departemen Pertanian, 2009).

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah :

1. Keberadaan Gapoktan
2. Keberadaan penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani
3. Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll dan
4. Penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani (Departemen Pertanian, 2009).

Strategi dasar pengembangan usaha agribisnis perdesaan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.
2. Optimasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal.
3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin kepada sumber modal.
4. Pendampingan bagi Gapoktan (Departemen Pertanian, 2009).

Strategi operasional dari Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
  - a. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
  - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi penyelia mitra tani;
  - c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan;
  - d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, melalui :
  - a. Identifikasi potensi desa;
  - b. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan;
  - c. Penyusunan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.

3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, melalui :
  - a. Penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
  - b. Fasilitisasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Pendampingan Gapoktan dilaksanakan melalui :
  - a. Penempatan dan pengurusan penyuluh pendamping di setiap Gapoktan;
  - b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten atau kota  
(Departemen Pertanian, 2009).

## 2.2 Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya

Defenisi Lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat (Suyatno, *et al.*, 2007). Menurut defenisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997) dalam Ashari (2006), kredit Mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Asian Development Bank (ADB) dalam Ashari (2009) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*Payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan : (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa, (2) petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3) karakteristik usahatani umumnya membutuhkan *platfond* kredit yang tidak terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. (4) dekatnya lokasi LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; (5) adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Ashari, 2009). Menurut Ismawan (2003), setidaknya terdapat beberapa hal yang diperankan LKM yaitu :

1. Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan keuangan mikro secara luas, secara efektif akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro, maka perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan.

2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.

### 3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil.

Sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi. Disamping itu, dengan semakin cepatnya perkembangan usaha kecil akan ikut mendukung perkembangan usaha besar, serta sebaliknya.

### 4. Mengurangi *Capital Outflow* dari desa-kota maupun daerah-pusat

Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 trilyun rupiah pada BRI Unit desa. Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya (Bank Indonesia, 2002). Hal ini memperlihatkan bahwa akses faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap oleh masyarakat kota. Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat desa telah "disedot" oleh masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan, sedangkan *capital outflow* dari daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah. Lembaga keuangan mikro, lebih berkemampuan memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.

### 5. Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (*capital*, tanah, SDM) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan berkurang, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada

kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap hutang luar negeri akan berkurang.

### 2.3 Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Menurut Departemen Pertanian (2005) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/masyarakat tani diperdesaan guna memecahkan masalah/kendala akses terhadap pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan dan *simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis*. Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu :

1. Tidak menggunakan pola keuangan perbankan konvensional.
2. Mempersyaratkan adanya penjaminan non agunan.
3. Menerapkan proses administrasi yang sederhana dan bertanggung jawab.

Agar LKM-A dapat berkembang, tumbuh menjadi kuat dan lestari dalam memberikan layanan keuangan kepada para anggota, maka lembaga keuangan ini perlu memegang teguh dan melaksanakan prinsip-prinsip yang telah teruji sebagai berikut :

- a. Modal LKM-A haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib (dapat ditambahkan dengan simpanan pokok khusus atau "Modal Penyertaan" sebagai penguat modal, dengan perlakuan seperti investasi anggota pada lembaga keuangan). Selain itu LKM-A dapat membuka berbagai jenis tabungan (simpanan sukarela).
- b. Agar anggota LKM-A mempunyai rasa yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A untuk mempunyai simpanan pokok khusus (penyertaan modal) di LKM-A. Simpanan pokok khusus ini sama halnya dengan penanaman saham pada lembaga keuangan formal seperti bank.

- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota, dapat menerima warga masyarakat di lingkungannya secara selektif untuk menjadi anggota tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosialnya.
- d. Layanan pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM-A saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- e. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional, berorientasi pada fungsi bisnis dan sosial.
- f. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktifitas orang secara layak dan rasional.
- g. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- h. Kepemimpinan demokratis, ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama, satu orang anggota satu suara, (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus, (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam rapat anggota pendiri, (iv) manajemen diselenggarakan terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan secara berkala.
- i. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha yang layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan professional kepada para anggota, pertumbuhan dan kelestarian.
- j. Mengalokasikan sumber dana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya.
- k. Membangun jaringan kerjasama antar LKM-A dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.

- l. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
- m. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri dan kelayakan usahanya.

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat (2009) tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP di Sumatera Barat, dipaparkan bahwa sistem pengelolaan dana di LKM-A adalah sebagai berikut :

1. Manajer Umum

- a) Manajer umum bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktifitas operasional LKM-A guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b) Tanggung jawab manajer umum juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus Gapoktan.
- c) Bertanggung jawab untuk operasional yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staf manajemen.

Tugas utama dan wewenang manajer umum:

1. Membuat dan menerapkan rencana-rencana serta sasaran dari bawahan langsung.
2. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi:
  - a. Rencana pemasaran
  - b. Rencana pembiayaan

- c. Rencana biaya operasional
  - d. Rencana keuangan.
3. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana:
    - a. Menyetujui sasaran pemasaran jangka pendek dan jangka panjang.
    - b. Mengevaluasi pelaksanaan usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
    - c. Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut serta dalam pembiayaan dan penggalangan dana yang penting bila perlu.
  4. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana.
  5. Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang telah ditetapkan.
  6. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara rekan sekerjanya secara fungsional di area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.
  7. Memberikan persetujuan atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, insentif, dengan pendapatan dan penghargaan.
  8. Mengarahkan persiapan dan persetujuan anggaran biaya dan operasional pemasaran LKM-A.
  9. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus Gapoktan/LKM-A Badan Pengawas/Dewan Pendiri, berupa :
    - a. Laporan pembiayaan baru
    - b. Laporan perkembangan pembiayaan
    - c. Laporan dana

d. Laporan keuangan

Hubungan kerja utama :

- 1) Bekerjasama dengan unit usaha otonom Gapoktan yang ada untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem informasi.
- 2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
- 3) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dan lain-lain).
- 4) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk membuat target-target finansial LKM-A.
- 5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

2. Bagian keuangan dan administrasi

Bagian keuangan ini adalah menangani administrasi dan keuangan menyusun dan melaporkan keuangan. Tugas-tugas :

- a. Mengerjakan jurnal buku besar
- b. Menyusun neraca dan laporan rugi/laba secara periodik.
- c. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana.
- d. Membantu manajer dalam hal pembuatan arus kas dan budgeting.

### 3. Bagian pembiayaan

Bagian ini berwenang dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam, serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet. Tugas-tugas :

- a. Menyusun rencana pembiayaan
- b. Menerima analisa pembiayaan
- c. Melakukan analisa pembiayaan
- d. Mengajukan pembiayaan kepada komite
- e. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- f. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

### 4. Penggalangan dana

Kewenangan bagian ini adalah melakukan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal LKM-A. Tugas-tugas :

- a. Menyusun rencana pengerahan tabungan
- b. Merencanakan produk-produk tabungan
- c. Melakukan analisa data tabungan
- d. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- e. Membuat laporan perkembangan tabungan

### 5. Kasir

Kasir berwenang sebagai penerima dan juru bayar. Tugas-tugas :

- a. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
- c. Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- d. Membuat buku kas harian

- e. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer (BPTP Sumatera Barat, 2009).
6. Ciri-ciri LKM yang sehat (BPTP Sumatera Barat, 2009) :
- a) Jumlah kekayaan yang produktif minimal 80% terhadap seluruh kekayaan, dengan ketentuan : (i) maksimum kas berupa uang tunai tambah tabungan lancar di bank tidak melebihi 5% dari seluruh kekayaan; (ii) maksimum harta tetap 15% dari seluruh kekayaan.
  - b) Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 25% terhadap seluruh jumlah kekayaan.
  - c) Tingkat pertumbuhan kekayaan pertahun harus lebih besar dari tingkat inflasi.
  - d) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk seorang anggota tidak melebihi 25% dari modal sendiri LKM-A.
  - e) Hutang kepada bank atau pihak ketiga lainnya maksimum 75% terhadap jumlah kekayaan.
  - f) Jumlah kekayaan lancar minimum 120% terhadap kewajiban lancar yang harus dibayar.
  - g) Semua aspek dan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi) LKM-A berjalan baik.
  - h) Jangkauan layanan pinjaman merata. Minimal 65% dari jumlah seluruh anggota masih memiliki sisa pinjaman.
  - i) LKM-A memperoleh tingkat pendapatan lebih besar dibanding rata-rata bunga deposito bank.

- j) Biaya operasional maksimum 50% terhadap pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah penerimaan bunga kredit dikurangi beban biaya dana dari hutang pihak ketiga maupun anggota dalam setahun.
- k) Tunggakan maksimum 5% terhadap sisa kredit anggota dan tidak lebih dari separohnya berada pada posisi diragukan dan macet.

#### 7. Perubahan sikap anggota yang diperlukan untuk membangun LKM-A.

- a. Sikap meminta-minta kepada sikap memberi. Perlunya penumbuhan budaya menabung di LKM-A dengan motif untuk membantu orang lain.
- b. Cara berfikir jangka pendek menjadi cara berfikir jangka panjang. Perlunya kesadaran bahwa LKM-A perlu waktu untuk berfungsi secara efektif, keberhasilannya tergantung kepada kesabaran, ketekunan dan dukungan penuh semua anggota, tidak berfikir begitu LKM-A berdiri harus langsung melayani kebutuhan semua anggota.
- c. Cara berfikir tidak kritis menjadi cara berfikir kritis. Perlunya masukan dari semua anggota berupa usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pengelolaan LKM-A.
- d. Cara berfikir tidak rasional menjadi berfikir rasional. Perlunya perencanaan yang matang dan sistem kerja yang tepat guna.
- e. Cara berfikir feodal menjadi cara berfikir syura demokratis. Misalnya dalam rapat jangan hanya didominasi oleh orang tertentu saja. Pemilihan pengurus bukan hanya karena tokoh masyarakat, tapi karena pengetahuan, kemampuan dan waktunya (BPTP Sumatera Barat, 2009).

#### 8. Kedudukan dan fungsi LKM-A dalam lembaga Gapoktan

LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. LKM-A bergerak

dalam bidang pembiayaan bagi para petani dalam wilayah Gapoktan. Sebagai unit usaha Gapoktan, kedudukan LKM-A sejajar dengan unit usaha lainnya yang ada pada Gapoktan tersebut. Pengurus unit usaha LKM-A adalah pengurus Gapoktan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam AD/ART Gapoktan. Sedangkan yang mengelola LKM-A adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh pengurus LKM-A. Pengurus LKM-A mengeluarkan surat penunjukan atau pengangkatan tenaga pengelola LKM-A sesuai struktur organisasi LKM-A tersebut (BPTP Sumatera Barat, 2009).

#### 2.4 Tinjauan Tentang Kredit Pertanian

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth of faith*). Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*Debitur*) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, dapat berupa barang, uang ataupun jasa (Suyatno *et al.*, 2007).

Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian biaya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

##### A. Unsur -unsur kredit

Menurut Suyatno *et al.* (2007) terdapat beberapa unsur dalam kredit, antara lain:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa.

#### B. Tujuan kredit

Tujuan kredit yang diberikan adalah :

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah (keuntungan bagi pemerintah : a) penerimaan pajak; b) membuka kesempatan kerja.

#### C. Fungsi kredit

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna barang;
4. Meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
6. Meningkatkan kegairahan berusaha;
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan

8. Meningkatkan hubungan internasional (Suyatno *et al*, 2007).

## 2.5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Dalam menghadapi era pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif yang mana petani akan dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam keterkaitan usahatani dengan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhinya, serta persaingan dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya manusia petani menjadi warga negara yang potensinya dapat dikembangkan menjadi SDM yang mandiri dan berperan dalam pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pengorganisasian petani untuk menjadi suatu kekuatan dalam pembangunan pertanian, dengan adanya kelompok akan terjalin kerjasama antara petani dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, proses produksi, untuk mencapai skala ekonomi, serta proses pengelolaan usaha tani mulai dari pengadaan sarana, kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran (Departemen Pertanian, 2008).

Salah satu kelompok yang ada ditingkat petani adalah kelompok tani. Kelompok tani pada dasarnya merupakan sistem sosial, yaitu suatu kumpulan unit yang berada secara fungsional dan terikat oleh kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sudah saling mengenal satu sama lain (Soekanto, 1990). Menurut Samsudin (1997), kelompok tani adalah kumpulan petani yang bersifat non formal berada dalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani, memiliki pandangan dan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dimana hubungan satu sama lain sesama anggota bersifat luwes, wajar dan kekeluargaan. Rencana kerja kelompok tani berasal dari petani, dibuat oleh petani dan dikerjakan bersama oleh petani anggota. Dengan perencanaan akan tercipta niat atau janji setiap anggota untuk berperan serta dalam usaha pencapaian tujuan.

Kelompok tani menurut Mardikanto (1991), dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa dan petani taruna yang terikat secara *informal* dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan

kebutuhan bersama serta berada di bawah pengaruh seorang kontak tani. Di dalam pengertian ini termasuk juga gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang dibentuk atas dasar kemufakatan diantara petani yang bersangkutan.

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian, diantaranya adalah dengan membentuk Gapoktan (Departemen Pertanian, 2008).

Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan lemahnya aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Terhadap pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian, Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan. Namun demikian, jika Gapoktan dinilai lebih mampu menjalankan peranannya dibandingkan dengan kios saprodi ataupun pedagang pengumpul, maka Gapoktan dapat menggantikan peranan mereka (Departemen Pertanian, 2008).

Untuk mempertahankan kehidupan kelompok dapat berhasil menurut Soekanto (1990), dilihat beberapa ciri : 1) partisipasi semua anggota kelompok, 2) adanya kegiatan kelompok tempat anggota berpartisipasi semakin berhasil usaha kelompok mempertahankan kehidupan kelompok, 3) adanya kesempatan kelompok untuk mendapatkan anggota baru, semakin terbukanya kesempatan menerima anggota

baru semakin berhasil usaha untuk mempertahankan kehidupan kelompok. 4) adanya sosialisasi, yang merupakan proses pendidikan yang membuat anggota baru mengetahui norma, tujuan dan lain-lain yang ada dalam kelompok.

Suatu kelompok tani dikatakan dinamis jika interaksi sesama anggota lebih kuat dibandingkan dengan pihak luar kelompoknya. Makin kuat interaksi diantara petani anggota makin kuat kelompok tani tersebut sehingga makin mudah mencapai tujuan (Samsudin, 1997).

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Selanjutnya interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang menyangkut hubungan orang perorangan, perorangan dengan kelompok manusia maupun antar kelompok-kelompok manusia (Soekanto, 1990).

## **2.6 Konsep Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kinerja menjadi tolak ukur perilaku eksekutif untuk sukses dalam kompetisi dan memenuhi harapan semua pihak (Mulyadi, 1993).

Penilaian kinerja perusahaan merupakan sarana untuk mengukur efisiensi dan produktifitas perusahaan. Hasil penelitian digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan. Dengan mengetahui efisiensi dan produktifitas, maka perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan usahanya dalam mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil yang telah dicapai masih berada dibawah standar maka perusahaan harus meningkatkan lagi usahanya agar bisa mencapai standar (Glueck dan Armstrong, 1989).

Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu, yang diukur dengan laba dan komponen-komponennya. Kinerja yang baik akan memperlihatkan tingkat kesehatan suatu perusahaan pada tingkat yang baik pula. Tingkat kesehatan suatu perusahaan sangat penting artinya bagi pemilik, manajemen dan pemerintah. Bagi pemilik, tingkat kesehatan diperlukan untuk melihat tingkat pengembalian dari investasi yang telah mereka tanamkan melalui pendapatan per lembar saham. Karena populasi kondisi kesehatan perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.

Untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian. Ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat atau tidak, sehingga bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina dapat memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dibubarkan kegiatan operasinya. Penilaian kesehatan dilakukan setiap tahun, sehingga bank Indonesia dapat menyarankan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi atau malah liquid keberadaannya jika memang kondisi bank tersebut sudah parah (Kasmir, 1998).

## 2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubyarto (2005) kaitan pemberdayaan masyarakat tani, yaitu pertanian tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani melainkan pertanian adalah cara hidup (*way of life*) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Selanjutnya Supriyanto dan Subejo (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *colectif action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Peranan penyuluhan pertanian juga tergambar dari pengertian pemberdayaan masyarakat oleh Suhartini (2005) yaitu pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun, menguatkan dan membangun kelembagaannya, serta adanya pendampingan secara berkelanjutan menuju kearah kemandirian. Kemudian berdasarkan laporan Philip. H. Combs dan Manzoor Ahmed dalam Suhartini (2005), menyatakan tipologi pengembangan masyarakat ada empat model pendekatan yaitu, model pendekatan penyuluhan, pendekatan pelatihan, pendekatan koperasi swadaya dan pendekatan pembangunan terpadu.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerement*) adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana serta pengembangan Tiga-P yaitu a) Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat b) Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat dan c) Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketetapan distribusi aset sumberdaya fisik dan non-fisik yang diperlukan masyarakat (Margolang, 2008).

Menurut Margolang (2008) ada empat model pemberdayaan masyarakat pedesaan (kasus di provinsi Riau) yaitu, 1) Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), 2) program pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis, 3) Program pengembangan kawasan agropolitan.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut (DEPDAGRI, 2007) :

#### 1. Pengembangan masyarakat.

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif,

pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat serta fasilitator pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

## 2. Bantuan langsung masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

## 3. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal.

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

## 4. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, penendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Wijono (2005), yang berjudul "*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*" menjelaskan bahwa upaya pengentasan

kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal. Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM, serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM.

Hasil penelitian Silalahi, Herlina. Erawati (2008) dengan judul “ *Analisis Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Anggota (Studi Kasus : KSU LKM Sukma Karsa Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*” menjelaskan bahwa KSU LKM-A Sukma Karsa merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang khusus mengelola keuangan simpan pinjam. KSU LKM-A Sukma Karsa menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada anggota. Fungsi KSU LKM-A dalam menghimpun dana dalam bentuk kredit memberikan penilaian yang baik.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LKM-A Harapan Bundo sebagai unit usaha yang dimiliki Gapoktan Harapan Bundo. LKM-A Harapan Bundo yang terletak di Jln.Karang Ganting No.8 RT 01 RW 01 Kel.Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*), berdasarkan pertimbangan bahwa Gapoktan Harapan Bundo merupakan salah satu dari 7 Gapoktan yang menerima bantuan dana program BLM-PUAP pada tahap I Tahun Anggaran 2009 sesuai surat Keputusan Walikota Padang Nomor 1007 Tahun 2009 tanggal 23 November 2009 tentang penetapan Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2009 .

Berdasarkan data rekapitulasi perkembangan dana PUAP Kota Padang oleh PMT Kota Padang dan penyuluh Pendamping Lapangan yang memiliki wilayah kerja di Kel.Lubuk Lintah, Gapoktan dan LKM-A Harapan Bundo merupakan LKM-A yang memiliki perkembangan dana terbesar pada tahap I, sebesar Rp.228.190.000,- (Lampiran 5). LKM-A Harapan Bundo memiliki usaha unggulan yang sama dengan usaha dengan usulan Rencana Usaha Bersama (RUB), selain itu Gapoktan dan LKM-A Harapan Bundo teratur dalam aspek pengelolaan dan pengadministrasian kegiatan dalam mengelola dan menggulirkan dana program BLM-PUAP.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan , yaitu bulan Maret sampai dengan April 2011.

#### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian studi kasus (*case Study*). Menurut Nazir (2000), pendekatan penelitian dengan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dimana tujuannya adalah memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, indikator-indikator yang khas dan khusus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat yang khas dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dalam studi kasus, populasi yang akan diteliti lebih terarah atau terfokus pada sifat tertentu yang tidak berlaku umum, dibatasi oleh kasus, lokasi tempat tertentu, serta waktu tertentu. Studi kasus berusaha memberikan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek yang diteliti, karena anggapan bahwa sifat-sifat suatu individu merupakan gambaran dari individu yang lainnya (Daniel, 2003). Subjek dalam penelitian ini yang akan dijelaskan dan dideskripsikan ialah bagaimana LKM-A yang berperan sebagai pengelola dana penguatan modal dalam bentuk hibah dari pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha Gapoktan dan anggota yang bergabung menjadi anggota LKM-A.

Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik (Nazir, 2003).

Keterangan terperinci yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum dan profil Gapoktan dan LKM-A Harapan Bundo, pengelolaan dana PUAP yang dilakukan oleh unit usaha LKM-A, dan kinerja manajemen LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana Program BLM-PUAP. Data-data yang ada seperti laporan pertanggung jawaban Gapoktan, laporan keuangan LKM-A, dan data-data sekunder yang diperoleh, akan dianalisa dengan alat analisa dan indikator yang telah ditetapkan.

### **3.3 Teknik Pengambilan Responden dan *Key Informan***

Pemilihan responden dalam penelitian ini didasari atas keterlibatan dan pengetahuan masing-masing responden terhadap pengelolaan dana PUAP yang dijalankan oleh LKM-A Harapan Bundo. Responden dari Gapoktan yaitu

pengurus Gapoktan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLM-PUAP, adalah ketua, sekretaris, dan bendahara, sedangkan responden dari pengelola LKM-A seperti manajer LKM-A, bagian administrasi, pembiayaan dan keuangan, penggalangan dana dan kasir/teller yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana BLM-PUAP.

Responden dari anggota LKM-A yang berasal dari 3 (tiga) Poktan yang bergabung di Gapoktan Harapan Bundo, yaitu : (1) Saiyo Sakato, (2) Kandang Batu Sakato, dan (3) Kampung Kalawi Timur. Anggota dari ketiga Poktan ini hanya sebagian yang menjadi anggota LKM-A dan memperoleh bantuan dana BLM-PUAP. Sampel diambil secara acak, anggota yang dijadikan sampel yaitu anggota LKM-A Harapan Bundo yang meminjam dan sudah mengembalikan, dan jumlah responden dari keanggotaan LKM-A, berdasarkan teori menurut Surachmad *cit* Usman (2003), pengambilan jumlah sampel ditentukan, apabila jumlah populasi < 100 diambil 50%. 8 orang dari 15 orang anggota Poktan Saiyo Sakato, 6 orang dari 11 orang anggota Poktan Kandang Batu Sakato, dan 3 orang dari 6 orang anggota Poktan Kampung Kalawi Timur. Pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A juga dijadikan responden selain ketua umum Gapoktan dan Manajer Umum LKM-A sebagai *key informan* dalam penelitian ini.

Tabel 1. Rincian Responden dari Anggota LKM-A Harapan Bundo berdasarkan Kelompok Tani

No.	Kelompok Tani	Anggota LKM-A (Orang)	Responden (Orang)
1.	Saiyo Sakato	15	8
2.	Kandang Batu Sakato	11	6
3.	Kampung Kalawi Timur	6	3
	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>17</b>

Untuk memperkaya data maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai *key informan* yang dipilih secara sengaja (*Purposive*). Menurut Moleong (2004), *key informan* adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, agar informasi lebih aktual dan faktual maka *informan* yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dan memahami sepenuhnya objek kajian yang diteliti. PMT yang

dijadikan *key informan* adalah PMT kota Padang pada tahun 2009, dan penyuluh pertanian pendamping khusus untuk daerah Gurun Lareh dan Kelurahan Lubuk Lintah (Lampiran 1). Sedangkan staf Badan Penyuluh Pertanian (BPP) kota Padang yang dijadikan *key informan* ialah staf yang ditugaskan dalam program BLM-PUAP, yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran dana BLM-PUAP kepada LKM-A Gapoktan yang menerima bantuan dana tersebut.

Table 2. Rincian *Key Informan* Penelitian Kinerja LKM-A Harapan Bundo

No.	Unsur <i>Key Informan</i>	Jumlah (orang)
1.	Ketua Gapoktan Harapan Bundo	1
2.	Manajer Umum LKM-A Harapan Bundo	1
3.	PMT (Penyelia Mitra Tani) Kota Padang	1
4.	Petugas penyuluh pendamping Kel. Lubuk Lintah	1
5.	Staf Badan Penyuluh Pertanian (BPP) kota Padang	1
Total <i>Key Informan</i>		5

Alasan peneliti mengambil pihak-pihak di atas sebagai responden yaitu berdasarkan keterkaitan responden terhadap pengelolaan Gapoktan, LKM-A dan Poktan sebagai anggota Gapoktan Harapan Bundo, karena responden akan memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana BLM PUAP dan kinerja LKM-A Harapan Bundo.

Data dan informasi diperoleh dari responden melalui daftar kuesioner yang telah dibuat dan disediakan oleh peneliti. Ada 2 jenis kuesioner yang disiapkan, yang pertama kuesioner untuk responden pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A Harapan Bundo, yang berisi mengenai program kegiatan, keanggotaan, keuangan, hubungan dengan pihak eksternal, gambaran umum daerah penelitian, mengenai identitas LKM-A, dan dalam pengambilan keputusan, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tujuan penelitian.

Jenis kuesioner kedua untuk responden sebagai anggota LKM-A yang yang memanfaatkan dana BLM-PUAP untuk usaha-usaha produktif. Selain dengan kuesioner, peneliti juga memperoleh data melalui wawancara mendalam

dengan *key informan* dan responden yang telah mengisi kuesioner untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang akan diperoleh dari kuesioner.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan daftar pertanyaan pada *key informan* dan responden serta pengamatan langsung di lapangan.

Table 3. Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

No.	Kriteria	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Data Primer	Wawancara langsung dan dengan menggunakan daftar pertanyaan, kusioner yang dibuat oleh peneliti.	Pengurus Gapoktan, pengelola LKM-A, PMT, penyuluh pendamping, petani anggota Gapoktan dan LKM-A.
2.	Data Sekunder	Studi Kepustakaan terhadap laporan-laporan kegiatan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain.	Gapoktan Harapan Bundo, sekretariat PUAP, LKM-A, Badan Penyuluh Pertanian (BPP), internet dan Badan Pusat Statistika (BPS) kota Padang.

Sumber data primer adalah responden dan *key informan*, yang diperoleh melalui wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan dan kuesioner yang disiapkan oleh peneliti.

### 3.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka fokus kajian dalam penelitian, dirinci sebagai berikut :

3.5.1 Pada tujuan pertama yaitu mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo, maka fokus kajian yang diamati adalah :

1. Profil Gapoktan Harapan Bundo, mencakup tentang :
  - a. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Harapan Bundo
  - b. Sejarah dan tujuan berdiri
  - c. Organisasi
  - d. Permodalan
  - e. Keanggotaan
  - f. Usaha, produk dan perkembanganya.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo.
  - A. Rencana, realisasi, penggunaan dan pengembalian dana BLM-PUAP.
    - (1) Proses pencairan dana BLM-PUAP ke LKM-A
    - (2) Proses pembuatan rencana usaha Gapoktan
    - (3) Realisasi pencairan dana BLM-PUAP oleh LKM-A Harapan Bundo
    - (4) Penggunaan dan pengembalian dana BLM-PUAP oleh anggota LKM-A Harapan Bundo.
  - B. Pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo.
    - (1) Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Pengelola LKM-A Harapan Bundo.
    - (2) Laporan-laporan yang dibuat oleh pengelola LKM-A
    - (3) Sistem pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh pengelola LKM-A Harapan Bundo.
  - C. Sistem dan persyaratan anggota untuk meminjam
    - (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota
    - (2) Surat-surat yang penting untuk dilengkapi oleh anggota
    - (3) Akad dan perjanjian antara pengelola LKM-A dan anggota.
  - D. Proses dana bergulir dalam kelompok.
    - (1) Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pengelola LKM-A dalam memberikan pinjaman

- (2) Pelaksanaan dari perguliran dana BLM-PUAP
- (3) Kendala-kendala yang dihadapi pengelola dalam menggulirkan dana BLM-PUAP.
- (4) Sistem pengembalian pinjaman, dan usaha-usaha pengelola LKM-A untuk mengantisipasi pinjaman bermasalah.

E. Fungsi Penyelia Mitra Tani (PMT)

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PMT
- (2) Fungsi kerja PMT dalam membina LKM-A Harapan Bundo.

3.5.2 Dari tujuan penelitian yang kedua menganalisa kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) (Permeneg KUKM Nomor. 20/Per/M.KUKM/XI/2008), yang meliputi :

- a. Permodalan, penilaian terhadap kinerja permodalan LKM-A Harapan Bundo berdasarkan aspek modal sendiri, total aset, modal tertimbang, Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan pinjaman yang diberikan beresiko.
- b. Kualitas aktiva produktif, adalah kekayaan LKM-A yang mendatangkan penghasilan bagi LKM-A yang bersangkutan.
- c. Manajemen, penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu manajemen umum meliputi sasaran berupa rencana kerja tahunan LKM-A yang menjadi acuan.
- d. Efisiensi, penilaian terhadap efisiensi LKM-A Harapan Bundo didasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset, rasio efisiensi pelayanan.
- e. Likuiditas, hal yang menjadi penilaian adalah rasio kas dan rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima oleh LKM-A Harapan Bundo.
- f. Kemandirian dan pertumbuhan, penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan LKM-A didasarkan pada 3 rasio yaitu, rasio rentabilitas

aset, rasio rentabilitas modal sendiri, rasio kemandirian operasional pelayanan.

- g. Jatidiri koperasi/LKM-A, aspek penilaian jatidiri menggunakan 2 ratio yaitu ratio Partisipasi Bruto dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.

### 3.6 Analisa Data

Analisa dilakukan berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- 3.6.1 Pada tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo. Data-data yang diperoleh untuk pencapaian tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan sistem penyaluran dana yang dilaksanakan oleh LKM-A, maka alat analisa yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan memaparkan tentang profil LKM-A Harapan Bundo, terutama terkait dengan Gapoktan Harapan Bundo dan program BLM-PUAP, untuk pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo. Hasil pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo ini selanjutnya dibandingkan dengan beberapa petunjuk, pedoman dan panduan pengelolaan dana di LKM-A.

- 3.6.2 Pada tujuan kedua yaitu menganalisa kinerja LKM-A dalam mengelola dana BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (Permeneg KUKM Nomor. 20/Per/M.KUKM/XI/2008). Data-data laporan keuangan dan data-data manajemen LKM-A Harapan Bundo yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif, sehingga diperoleh kriteria LKM-A yang sehat atau tidak sehat, yang mencerminkan pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo. Aspek-aspek dan penetapan skor (Lampiran 7) dan dalam Table 4 berikut :

Table 4. Aspek dan Bobot Penilaian Kinerja LKM-A

No.	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1.	Permodalan	15
2.	Kualitas aktiva Produktif	25
3.	Manajemen	15
4.	Efisiensi	10
5.	Liquiditas	15
6.	Kemandirian dan pertumbuhan	10
7.	Jati diri LKM-A	10
	TOTAL	100

Sumber : Permenneq KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Tabel di atas merupakan tabel yang menjelaskan untuk bobot penilaian untuk 7 aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja LKM-A, kemudian diakumulasikan seluruh bobot dan dibandingkan dengan bobot penilaian dan penggolongan tingkat kesehatan LKM-A pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Penggolongan Tingkat Kesehatan LKM-A

SKOR	PREDIKAT
$8 < X \leq 100$	Sehat
$60 < X \leq 80$	Cukup Sehat
$40 < X \leq 60$	Kurang Sehat
$20 < X \leq 40$	Tidak Sehat
$< 20$	Sangat tidak Sehat

Sumber : Permenneq KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo berdasarkan tujuh aspek diatas diperoleh melalui perhitungan rasio-rasio dari masing-masing aspek. Persentase rasio-rasio tersebut dapat dihitung dengan rumus perhitungan dalam Tabel 6-12.

Skor aspek permodalan diperoleh dengan menghitung tiga rasio, yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko, dan rasio kecukupan modal. Komponen modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan dana hibah. Sedangkan total aset yaitu total aktiva lancar dan aktiva tetap yang dimiliki LKM-A. Rasio-rasio tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Rumus Perhitungan Rasio-rasio pada Aspek Permodalan

Aspek yang dinilai	Komponen Rasio	Rumus Perhitungan
Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset	$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$
	b. Rasio modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko	$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$
	c. Rasio kecukupan modal sendiri	$\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$

Sumber : Permenneg KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Aspek penilaian yang kedua yaitu aspek kualitas aktiva produktif, untuk memperoleh skor aspek kualitas aktiva produktif, rasio-rasio yang dihitung adalah terkait dengan komponen volume pinjaman, resiko pinjaman bermasalah, cadangan resiko, pinjaman bermasalah, BMPP (Batas Maksimum Pengembalian Pinjaman). Rasio-rasio ini dapat dihitung dengan rumus pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Rumus Perhitungan Rasio-rasio pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek yang dinilai	Komponen Rasio
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan  $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$
	b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap volume pinjaman  $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$
	c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah  $\frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$
	d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman  $\frac{\text{BMPP}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$

Aspek penilaian yang ketiga yaitu aspek manajemen, rasio-rasio yang akan dihitung untuk memperoleh skor aspek manajemen, maka komponen yang terkait ialah manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas. Untuk memperoleh masing-masing komponen digunakan pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen LKM-A.

Tabel 8. Komponen Penilaian Aspek Manajemen

Aspek yang dinilai	Komponen	Jumlah pertanyaan
Manajemen	a. Manajemen umum	12 Pertanyaan
	b. Kelembagaan	6 Pertanyaan
	c. Permodalan	5 Pertanyaan
	d. Manajemen aktiva	10 Pertanyaan
	e. Manajemen Likuiditas	5 Pertanyaan

Sumber : Permenneq KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Aspek penilaian keempat yaitu aspek efisiensi, untuk memperoleh skor aspek efisiensi, maka komponen rasio yang berkaitan seperti biaya operasional, partisipasi bruto, total aset, dan total aktiva. Perhitungan masing-masing rasio dapat dilihat pada tabel rumus perhitungan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Rumus Perhitungan Rasio-rasio Aspek Efisiensi

Aspek yang dinilai	Komponen rasio
Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$
	c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya gaji dan honorarium karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$

Sumber : Permenneq KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Aspek penilaian kelima dalam penilaian kinerja LKM-A yaitu aspek likuiditas. Untuk memperoleh skor untuk aspek likuiditas ini komponen yang terkait adalah kas LKM-A, kewajiban lancar yang dimiliki LKM-A. Perhitungan rasio untuk memperoleh skor likuiditas berdasarkan Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Rumus Perhitungan Rasio-rasio pada Aspek Likuiditas

Aspek yang dinilai	Komponen Rasio
Likuiditas	a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$
	b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Volume pinjaman}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$

Sumber : Permeneg KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Aspek penilaian keenam yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan, meliputi komponen seperti aset LKM-A, biaya operasional, dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk memperoleh skor aspek ini digunakan rumus perhitungan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Rumus Perhitungan Rasio-rasio pada Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek yang dinilai	Komponen rasio	Rumus Perhitungan
Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset	$\frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$
	b. Rentabilitas modal sendiri	$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$
	c. Kemandirian operasional Pelayanan	$\frac{\text{SHU kotor}}{\text{Beban usaha} + \text{beban perkopersian}} \times 100\%$

Sumber : Permeneg KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Aspek penilaian ketujuh yang dinilai yaitu aspek jatidiri LKM-A, untuk memperoleh skor aspek jatidiri LKM-A komponen yang terkait seperti partisipasi bruto anggota, promosi ekonomi anggota dan manfaat ekonomi partisipasi pemanfaatan pelayanan. Rumus perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12. Rumus Perhitungan Rasio-rasio Aspek Jatidiri LKM-A

Aspek yang dinilai	Komponen rasio
Jatidiri LKM-A	a. Rasio partisipasi bruto  $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$

Sumber : Permenneq KUKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

### 3.7 Defenisi Operasional

1. Kinerja yang dimaksud disini adalah pengelolaan Gapoktan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal (Hendayana dan Bustamam, 2008).
2. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang saling mengenal, bersatu karena ingin bekerjasama dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi bukan hanya kumpulan modal, karena modal hanyalah sebagai sarana untuk meningkatkan rasa setia kawan anggota dalam mengatasi persoalan.
3. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian dibidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervise dan advokasi kepada penyuluh dan pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP.
4. Pemanfaatan dana adalah bentuk penggunaan dana yang disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan oleh kelompok dan dengan adanya persetujuan dari dinas terkait.

5. Penguatan modal usaha kelompok adalah dana yang diberikan kepada kelompok untuk mengatasi keterbatasan modal. Dana tersebut diberikan pertama sekali pada tahun 2007 dengan jumlah dana Rp.100.000.000,- per Gapoktan yang memenuhi persyaratan penerima dana BLM PUAP.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat salah satunya yaitu dengan adanya Gapoktan yang berdiri dari masyarakat dan untuk masyarakat.
7. Modal tertimbang adalah jumlah hasil kali setiap komponen modal LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
8. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
9. Ratio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
10. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan LKM-A dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.
11. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah mengukur kemampuan LKM-A memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya maka semakin baik.
12. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa (Departemen Pertanian, 2009).
13. Kesehatan LKM-A adalah kondisi atau keadaan LKM-A yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat.
14. Modal sendiri LKM-A adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya

dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

15. Likuiditas adalah kemampuan LKM-A untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
16. Rentabilitas adalah kemampuan LKM-A untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU).
17. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan LKM-A dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
18. Cadangan tujuan resiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup resiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.
19. Aktiva produktif adalah kekayaan LKM-A yang mendatangkan penghasilan bagi LKM-A yang bersangkutan.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang bersifat non formal berada dalam lingkungan pengaruh seorang kontak tani, memiliki pandangan dan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dimana hubungan satu sama lain sesama anggota bersifat luwes, wajar dan kekeluargaan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja LKM-A Harapan Bundo

#### 4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji

Kelurahan Lubuk Lintah di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memiliki luas daerah 4,03 Km<sup>2</sup>. Kelurahan ini berjarak 2 Km dari Ibukota Kecamatan, 6 Km dari pusat kota Padang, dan 4 Km dari ibu kota Provinsi. Daerah ini memiliki batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Batang Kuranji/Kelurahan Kalumbuk, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Anduring, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ampang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ambacang (BPS Kota Padang, 2010).

Wilayah kerja LKM-A Harapan Bundo Kelurahan Lubuk Lintah memiliki luas daerah 4,03 Km<sup>2</sup>, jarak dari ibukota Kecamatan 2 Km, jarak dari pusat Kota Padang 6 Km, dan jarak dari ibukota Provinsi 4 Km. Topografi Kelurahan Lubuk Lintah daerah dataran sampai landai. Mata pencarian penduduknya terdiri dari pertanian, dagang, Industri rumah tangga, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kecamatan Kuranji memiliki luas daerah 57,41 Km<sup>2</sup>, dengan topografi dataran dan daerah berbukit. Khusus Kelurahan Lubuk Lintah pada daerah dataran sampai landai dan berada pada ketinggian 17-21 m dari permukaan laut (mdpl). Jenis tanah dominan subur yang merupakan lahan sawah dan lahan kering yang telah digunakan untuk pengembangan komoditas padi sawah, sayur-sayuran. Status lahan pada umumnya milik sendiri dan digarap sendiri, sebagian lagi adalah tanah adat (BPS, Kota Padang, 2010).

#### 4.1.2 Penduduk dan Potensi Kelurahan Lubuk Lintah

Jumlah penduduk Kelurahan Lubuk Lintah sebanyak 8.951 jiwa atau sekitar 11,77% dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Kuranji (105.370 jiwa), dengan kepadatan penduduk 2,096 per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kelurahan Lubuk Lintah ini terdiri dari 4.363 jiwa laki-laki dan 4.588 jiwa perempuan (BPS Kota Padang, 2010).

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan Kuranji ini dapat dikatakan memadai, seperti adanya jalan raya kelurahan, jalan raya kecamatan dan jalan raya kota. Kelancaran transportasi didukung oleh sarana angkutan darat seperti mobil angkutan ke kelurahan, ke pusat kecamatan, dan ke pusat kota Padang, serta ojek.

Sarana dan prasarana lainnya berupa lembaga-lembaga keuangan yang ditujukan untuk membantu masyarakat kecamatan Kuranji dalam hal pembiayaan dan menyimpan dana mereka. Namun sejauh ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada tersebut belum mendapat sambutan baik dari masyarakat di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh prosedur peminjaman dan menabung yang dianggap masyarakat masih berat. Sebagai contoh, adanya persyaratan agunan pada BRI dan BPR. Kemudian, untuk meminjam modal di KUD atau koperasi lainnya, membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena kebanyakan petani di kelurahan Lubuk Lintah sudah banyak yang menjadi anggota koperasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan usahatani anggotanya tidak optimal. Potensi yang ada di Kel.Lubuk Lintah, baik dari potensi penduduk dan sarana prasarana akan mendukung pengembangan LKM-A Harapan Bundo dalam usaha pembiayaan yang LKM-A untuk kesejahteraan masyarakat tani yang berada di Kel.Lubuk Lintah.

## **4.2 Profil LKM-A Harapan Bundo**

### **4.2.1 Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Harapan Bundo.**

Dasar terbentuknya Gapoktan Harapan Bundo ialah atas kesepakatan masyarakat Kelurahan Lubuk Lintah yang tergabung dalam beberapa kelompok tani yang ada pada daerah tersebut untuk mengatasi permasalahan permodalan. Dasar pembentukan Gapoktan ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang kelembagaan tani. Pembentukan Gapoktan ini juga didasari oleh kebijakan pemerintah agar penyaluran dana program BLM-PUAP yang dimulai pada tahun anggaran 2008 dapat disalurkan melalui Gapoktan, sehingga penyaluran dana BLM-PUAP tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan usaha produktif anggota.

Gapoktan Harapan Bundo didirikan pada tanggal 7 Januari 2007 setelah diadakannya musyawarah antara kelompok-kelompok tani yang ada di Kelurahan Lubuk Lintah dan kemudian ditetapkan dengan surat akta Notaris (Yenita Asmawel) Akta lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Bundo Nomor 19 Tanggal 16 Juli 2009, Akta Notaris ini sebagai legalitas operasional Gapoktan yang berdiri atas kesepakatan mereka dan merupakan cermin solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Dasar hukum dalam pelaksanaan LKM-A adalah berdasarkan UU No.25/1992. Untuk legalitas operasional LKM-A maka LKM-A Harapan Bundo memerlukan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian.

Sebagai wujud nyata untuk mencapai tujuan tersebut, maka Gapoktan Harapan Bundo juga membentuk dan mengaktifkan beberapa unit usaha otonomnya, yaitu unit usaha produksi, unit sarana dan prasarana, unit pengolahan hasil, unit pemasaran dan unit pembiayaan yang dinamakan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, yang diberi nama LKM-A Harapan Bundo (Lampiran 9).

#### **4.2.2 Organisasi**

Kementerian Pertanian Indonesia (2010), menjelaskan bahwa Gabungan Keloampok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani di perdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha anggotanya. Untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis,

peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat perdesaan. Sehingga dalam mengukur kapasitas dan aspek tatakelola organisasi dalam sebuah Gapoktan PUAP atau LKM-A harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

- a. Aturan yang dimiliki. Aturan yang harus dimiliki oleh LKM-A adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang disusun oleh petani anggota, pengurus dan pengelola LKM-A untuk menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- b. Pengelola LKM-A. Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi kepada pihak internal dan eksternal. Sedangkan pengelola merupakan pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai dengan AD/ART.
- c. Rencana kerja. Rencana kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota dan merupakan dasar bagi pengelola LKM-A dalam pengembangan usaha dan bisnis LKM-A. Pembentukan rencana yang ideal sebaiknya dilakukan secara partisipatif.
- d. Rapat anggota secara berkala. Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal merupakan alat ukur kedinamisan pengelolaan LKM-A sebagai organisasi ekonomi.
- e. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT dan jadwal pelaksanaannya merupakan ukuran keberhasilan pengelola dalam mencapai tujuan dan mengorganisasikan LKM-A sebagai Lembaga Ekonomi.
- f. Badan Hukum. Badan Hukum merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh LKM-A sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana petani dan masyarakat. LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Disamping itu, Gapoktan juga dapat menggunakan badan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) walaupun secara teknis belum/tidak dapat dipakai sebagai

dasar program linkage dengan lembaga keuangan lainnya (Kementerian Pertanian, 2010).

Organisasi dan manajemen yang baik merupakan tulang punggung keberhasilan suatu kelompok, demikian pula halnya dengan LKM-A. Penyusunan struktur organisasi dan manajemen LKM-A Harapan Bundo diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh LKM-A ini.

Struktur organisasi Gapoktan dan LKM-A berbeda dan memiliki struktur masing-masing. Gapoktan memiliki struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, unit produksi, unit sarana dan prasarana, unit pengolahan hasil, unit pemasaran, dan unit pembiayaan yaitu LKM-A.

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2009, struktur organisasi LKM-A, terdiri dari badan pembina LKM-A yaitu UPTD kecamatan Kuranji, penyuluh pendamping kelurahan Lubuk Lintah, dan pengelola LKM-A Harapan Bundo terdiri dari manajer umum LKM-A, kasir/teller, pembiayaan, ADM dan keuangan, dan penggalangan dana. Pada struktur organisasi pengelola LKM-A, ketua, sekretaris, dan bendahara Gapoktan merupakan badan pengurus LKM-A (Lampiran 8).

Berdasarkan struktur organisasi LKM-A, terlihat bahwa ada beberapa struktur organisasi tambahan, atau sedikit berbeda dari pedoman struktur organisasi LKM-A yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Struktur tambahan tersebut adalah BPK (Badan Penyelamatan Keuangan). BPK ini merupakan bentukan dari Gapoktan Harapan Bundo untuk menekan tingkat kemacetan pembiayaan di LKM-A Harapan Bundo. BPK ini difungsikan untuk memberikan pembinaan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjamannya di LKM-A Harapan Bundo. BPK ini berasal dari kepengurusan Gapoktan Harapan Bundo (Lampiran 9). Dalam hal ini pemuka masyarakat di wilayah kerja LKM-A juga mengambil peran untuk mengontrol dalam pembayaran cicilan dan penggunaan dana pinjaman dari LKM-A Harapan Bundo.

Selain itu, ada dua jabatan yang kosong yaitu di bidang pembiayaan dan ADM dan keuangan. Kekosongan fungsi ini disebabkan oleh keluarnya dua orang pengelola LKM-A karena harus memenuhi panggilan pekerjaan lain keluar Kota

Padang, keluarnya pada tahun yang sedang berjalan ini, sehingga untuk penunjukan pengisian jabatan harus melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun berikutnya. Untuk menjalankan fungsi kerja ini, manajer umum bersama pengelola lainnya bekerjasama dengan pengurus Gapoktan Harapan Bundo mengatasi bersama untuk tugas-tugas bidang ADM dan keuangan dan pembiayaan, sehingga kekosongan jabatan ini tidak berakibat buruk terhadap pelaksanaan usaha-usaha di LKM-A Harapan Bundo. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya LKM-A dan Gapoktan Harapan Bundo akan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat pengelola LKM-A Harapan Bundo agar tidak terjadi lagi kekosongan fungsi kerja seperti pengelolaan periode 2010.

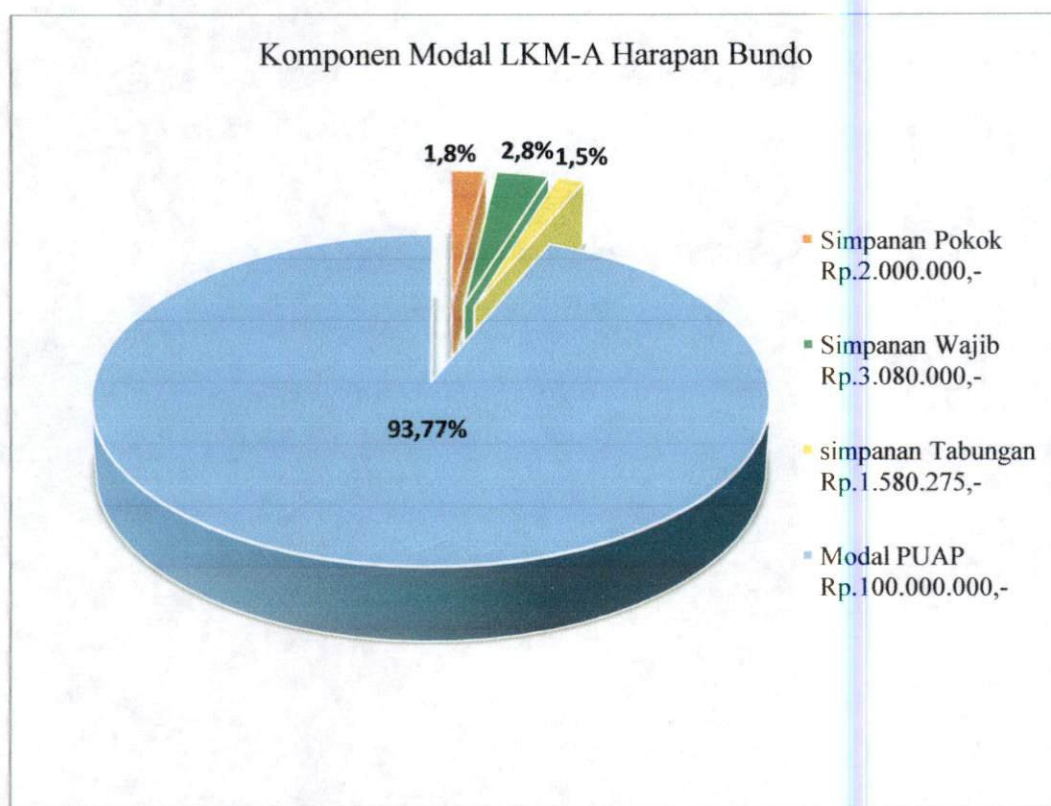
Tabel 13. Aspek yang diamati dalam Mengukur Kapasitas dan Aspek Tatakelola Gapoktan PUAP atau LKM-A

No.	Aspek Pengamatan	Hasil pengamatan
1.	Aturan yang dimiliki	Aturan yang harus dimiliki oleh LKM-A adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun oleh petani anggota, pengurus dan pengelola LKM-A Harapan Bundo.
2.	Pengelola LKM-A	Pengelola dan pengurus dalam LKM-A Harapan Bundo memiliki pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A masing-masing memiliki struktur organisasi.
3.	Rencana kerja	Rencana kerja yang disusun oleh LKM-A Harapan Bundo diputuskan melalui rapat anggota.
4.	Rapat anggota secara berkala	Harapan Bundo melaksanakan rapat anggota secara berkala dan terjadwal sekali dalam 3 bulan.
5.	Penyelenggaraan (RAT)	RAT dan jadwal pelaksanaannya LKM-A Harapan Bundo telah menjadwalkannya setahun sekali.
6.	Badan hukum	Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 Tahun 1995, dan LKM-A Harapan Bundo menggunakan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 16 Juli 2009.

### 4.2.3 Permodalan

Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM-A Harapan Bundo menjelaskan bahwa modal LKM-A terdiri dari modal sendiri/ekuitas, modal luar/pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Modal pinjaman berasal dari pinjaman anggota, pinjaman dari lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Selain dari yang disebutkan diatas, modal LKM-A juga dapat berasal dari pihak ketiga yang ingin bekerjasama dengan LKM-A Harapan Bundo dalam hal permodalan, dimana pihak ketiga tersebut nantinya akan memperoleh pembagian hasil usaha dari usaha yang modalnya diikutsertakan di dalamnya, sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkannya dan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat.

Berdasarkan neraca LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010 (Lampiran 11 dan 12.), dapat dilihat bahwa modal yang dimiliki oleh LKM-A Harapan Bundo sebagaimana dalam Gambar 1 berikut :

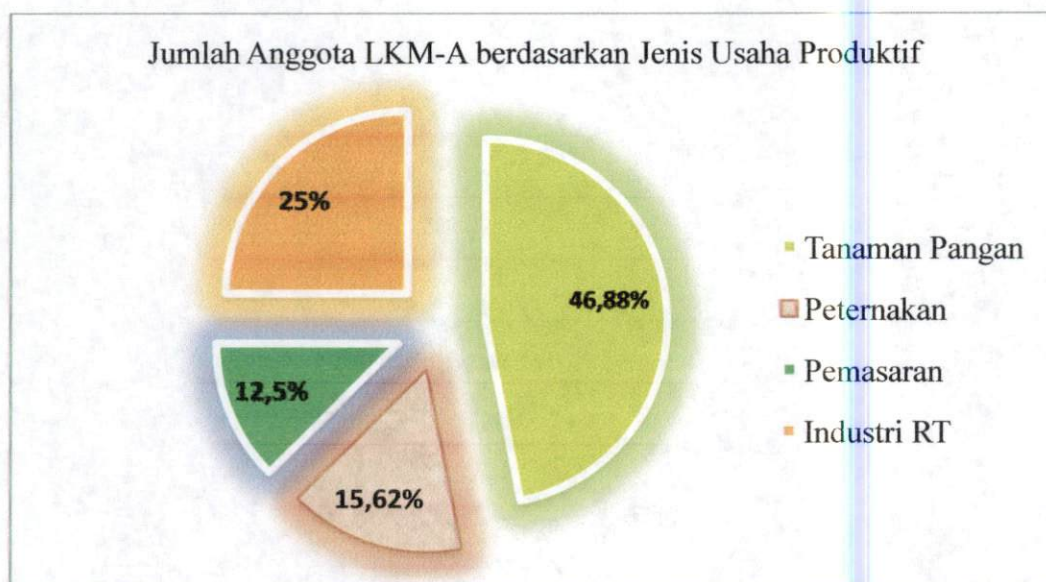


Gambar 1. Komponen Modal LKM-A Harapan Bundo

Pada gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa sumber dan komponen permodalan LKM-A Harapan Bundo sebagian besar merupakan sumber dari dana BLM-PUAP, yang menyokong sebagian besar dari kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan LKM-A Harapan Bundo. Simpanan pokok anggota sebesar Rp. 50.000,- dibayar pada saat menjadi anggota LKM-A Harapan Bundo, sedangkan simpanan wajib sebesar Rp.5.000,-/bulan, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak mempengaruhi besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh LKM-A Harapan Bundo. Tabungan senilai Rp.1.580.275,- merupakan tabungan sukarela dari anggota. Modal penyertaan yaitu dana BLM-PUAP dari pemerintah sebanyak 94% dari komponen modal LKM-A Harapan Bundo, ini karena LKM-A Harapan Bundo masih pada tahap pemupukan modal untuk pembiayaan anggota LKM-A Harapan Bundo.

#### 4.2.3 Keanggotaan

Berdasarkan data pada bulan Maret 2011 saat penelitian, jumlah anggota Gapoktan Harapan Bundo yang telah memanfaatkan dana BLM-PUAP dan bergabung ke LKM-A Harapan Bundo sampai Maret 2011 adalah sebanyak 32 orang, berasal dari berbagai jenis usaha produktif (Lampiran 13), jumlah anggota tersebut dapat dirinci sebagaimana pada Gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Persentase Jumlah Anggota LKM-A berdasarkan Jenis Usaha

Dari gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa jenis usaha produktif yang paling banyak anggota peminjamnya adalah bidang usaha pertanian padi sawah sebesar 46,88% dari jumlah seluruh anggota. Secara umum memang usaha ini menjadi prioritas bagi LKM-A Harapan Bundo dalam memberikan bantuan dana karena petani anggota yang banyak mengalami masalah dengan permodalan usaha pertanian padi sawah. Pada proses pengembalian dana usaha tanaman padi sawah ini tidak mengalami kesulitan karena pada akad peminjaman telah disepakati kemampuan petani anggota dalam pengembalian berdasarkan musim panen padi sawah yang akan dibiayai.

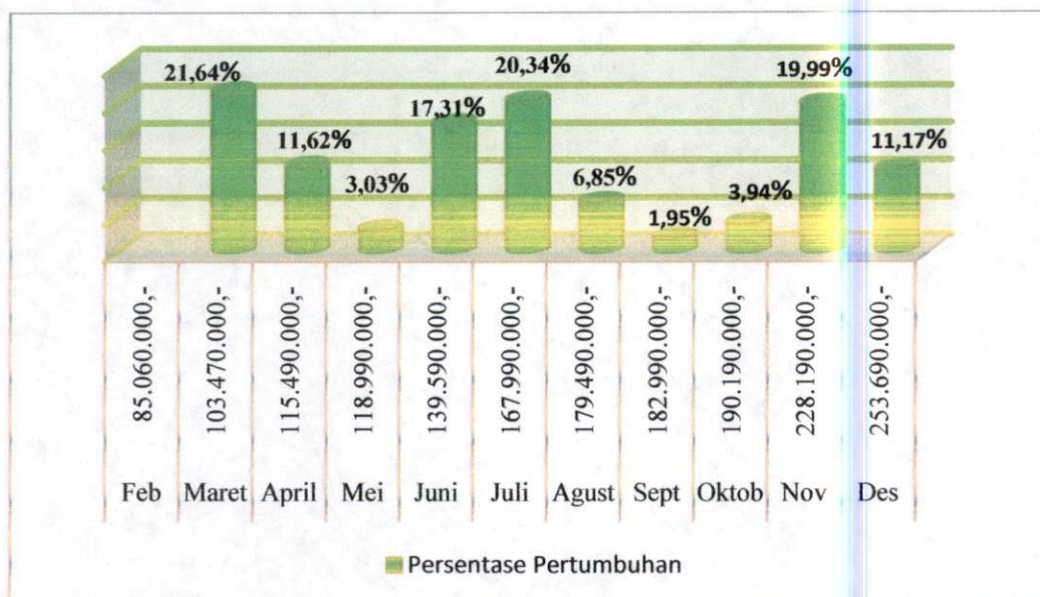
Jenis usaha pemasaran sebanyak 12,5% dari keseluruhan anggota yang sedang dibiayai adalah jenis usaha yang paling sedikit memanfaatkan pelayanan pembiayaan dari LKM-A Harapan Bundo, karena sebagian anggota LKM-A yang juga memasarkan hasil taninya sudah mengolahnya terlebih dahulu, dan meminjam ke LKM-A atas nama usaha industri rumah tangga. Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP Sumatera Barat, keanggotaan LKM-A dibagi atas tiga pengelompokkan, yaitu 1) anggota biasa, anggota ini adalah anggota LKM-A yang berasal dari anggota Gapoktan penerima dana PUAP, perorangan, dewasa dan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh LKM-A, 2) anggota luar biasa, yaitu perorangan yang memanfaatkan layanan tabungan LKM-A dan hanya memiliki hak bicara saja, 3) calon anggota, yaitu perorangan dewasa yang telah mengajukan permohonan menjadi anggota LKM-A serta telah memenuhi kewajiban yang telah disyaratkan, memiliki hak bicara, dan berhak atas pelayanan pinjaman dari LKM-A.

Agar pelayanan keuangan dapat tumbuh menjadi besar dan mencapai skala ekonomi yang layak, maka potensi calon anggota harus banyak terdiri dari pelaku utama dan pelaku usaha yang memerlukan layanan keuangan. Keanggotaan dinyatakan sah bila telah mengajukan permohonan tertulis, mendapat persetujuan dalam rapat pengurus, telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib serta memperoleh buku anggota. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota wajib mentaati peraturan yang telah disepakati dan berdisiplin, keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan pengurus (BPTP Sumatera Barat, 2009).

#### 4.2.4 Usaha, Produk dan Perkembangannya

Dalam pengembangan usahanya, LKM-A Harapan Bundo juga menciptakan berbagai bentuk produk tabungan. Produk ini bertujuan untuk menggalang dana swadaya disamping dana PUAP. Produk-produk simpanan tersebut adalah 1) Simpanan masyarakat (Simas); 2) Simpanan Idhul Fitri (Sidufi); 3) Simpanan ibu hamil (Sibumil); 4) Simpanan Qurban (Siaqur); 5) Simpanan pendidikan (Simpen). Menurut manajer umum LKM-A Harapan Bundo, pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan cara jempot bola agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Namun keterbatasan tenaga, produk-produk simpanan ini belum terlaksana sesuai harapan, karena produk-produk simpanan LKM-A ini baru diterapkan akhir tahun 2010.

Selayaknya, untuk pelaksanaan usaha ini membutuhkan tenaga tambahan untuk memasarkan produk dan mengumpulkan simpanan dari nasabah, sehingga saat ini pengelola lebih memfokuskan pada kegiatan dalam pemupukan modal melalui berbagai usaha, seperti penjualan saham, menjalin kemitraan dengan pihak lain dan usaha penambahan modal dari pemerintah. Perkembangan usaha pembiayaan dengan modal awalnya adalah dana PUAP ini dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Gambar 3 berikut ini :



Gambar 3. Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Pembiayaan (dana PUAP) LKM-A Harapan Bundo sampai dengan Desember 2010

Unit usaha inti dari LKM-A Harapan Bundo saat ini adalah bidang pembiayaan, perkembangan usaha ini tidak terlepas dari kontribusi dana PUAP yang dikucurkan pemerintah ke Gapoktan Harapan bundo. Disamping dana tersebut, pengelola juga berusaha untuk melakukan pemupukan modal dari sumber-sumber lain seperti penanaman modal pihak swasta atau penjualan saham LKM-A. Hal inilah yang menjadikan LKM-A Harapan Bundo mampu memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya.

Walaupun LKM-A Harapan Bundo belum berbadan hukum dan masih, namun berkat komitmen dan keoptimisan pengelola bersama pengurus Gapoktan yang terus aktif bekerjasama dalam perkembangan usaha ini, maka jumlah aset LKM-A Harapan Bundo terus meningkat. Perkembangan aset ini berasal dari usaha pembiayaan dengan modal awal dari dana PUAP. Pada gambar 5 di atas terlihat bahwa pada awal dimulai beroperasinya LKM-A Harapan Bundo, dana yang telah dijadikan usaha pembiayaan berjumlah Rp.85.060.000,-, dalam artian bahwa dana PUAP yang sudah dipinjamkan kepada anggota telah mencapai jumlah tersebut. Kemudian sampai dengan bulan Desember 2010 dana tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu sebesar Rp.253.690.000,-. Peningkatan itu menjadi motivasi bagi pengelola LKM-A Harapan Bundo untuk terus mengembangkan usahanya dengan dukungan semua pihak.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tahun 2010 tersebut bahwa dengan adanya kerjasama antara LKM-A, Gapoktan, pemerintah dan pihak swasta, serta pembinaan yang berkelanjutan dari PPL dan PMT, tahun 2011 diharapkan LKM-A Harapan Bundo dapat menambah modal untuk pembiayaan anggota dan dengan dana tambahan tersebut dapat mengembangkan usahanya.

### **4.3 Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo.**

#### **4.3.1 Rencana, Realisasi Pencairan, Penggunaan, dan Sistem Pengembalian Dana BLM-PUAP**

Proses pencairan dana BLM-PUAP di Gapoktan Harapan Bundo hingga dikelola oleh LKM-A, dilakukan dengan mengacu kepada beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh petunjuk dan pedoman pencairan dana BLM-PUAP yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Proses-proses tersebut meliputi pembuatan Rencana Usaha Anggota (RUA) yang dibuat anggota ke tiga kelompok tani, pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat berdasarkan RUA oleh pengurus Poktan, dan pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB) berdasarkan RUK yang dibuat pengurus Gapoktan. Proses pembuatan rencana-rencana tersebut sebagaimana dalam tabel 8 berikut :

Tabel 14. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Harapan Bundo

No.	Jenis Rencana	Rincian Isi Rencana	Pelaksana/Pembuat
1	2	3	4
1.	Rencana Usaha Anggota (RUA)	Dokumen rencana usaha per anggota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data anggota</li> <li>- Jenis usaha</li> <li>- Volume usaha</li> <li>- Kebutuhan biaya</li> <li>- Jadwal pemanfaatan</li> </ul>	RUA ini dibuat oleh anggota masing-masing Poktan dan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh ketua Poktan yang bersangkutan.
2.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	Rekapitulasi RUA meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data base Poktan</li> <li>- Nama, tanda tangan dan jenis usaha anggota.</li> <li>- Volume dan nilai usaha jadwal pemanfaatan.</li> </ul>	RUK ini dibuat oleh ketua Poktan yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Bundo dan diperiksa dan disahkan oleh ketua Gapoktan.
A	Rencana Usaha Bersama (RUB)	Rekapitulasi RUK dengan batasan dana PUAP meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data base Gapoktan</li> <li>- Pengurus Gapoktan</li> <li>- Nomor rekening Gapoktan</li> <li>- Nama dan alamat Bank</li> <li>- Rincian jenis usaha Produktif</li> <li>- Satuan volume</li> <li>- Nilai/total dana PUAP.</li> </ul>	RUB ini dibuat dan ditandatangani oleh ketua Gapoktan Harapan Bundo, dan selanjutnya di setujui oleh ketua tim teknis PUAP Kota Padang.

Sumber : Profil Gapoktan Harapan Bundo, 2011 (data diolah).

Sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun oleh Gapoktan Harapan Bundo sebelum pencairan dana PUAP ke rekening Gapoktan (Lampiran 14), dapat dilihat bahwa dana program BLM-PUAP direncanakan penggunaannya untuk lima jenis usaha produktif. Penyusunan RUB ini berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) (Lampiran 15,16 dan 17).

Petani anggota membuat sendiri RUA berdasarkan tujuan penggunaan dana PUAP yang ditetapkan oleh Gapoktan, dan apabila ada keraguan atau kekeliruan, petani bertanya langsung kepada pengurus Gapoktan atau kepada penyuluh pendamping petani lapangan. Setelah RUA selesai dibuat, penyuluh pendamping dan pengurus Gapoktan memeriksa kembali RUA yang dibuat oleh petani anggota LKM-A, untuk koreksi akhir sebelum dijadikan bahan untuk membuat RUK, dengan keseluruhan RUK Poktan pengurus Gapoktan dapat membuat RUB yang berisi rencana pencairan dana PUAP oleh Gapoktan kepada anggota. RUB ini merupakan syarat untuk memperoleh dana BLM-PUAP.

Rencana pencairan dan penggunaan dana BLM-PUAP dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 15. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP.

No.	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Jadwal Pencairan	September-November 2009	Februari-Desember 2010
2.	Penerima	32 Orang	65 Orang
3.	Jenis Usaha (penggunaan)	5 Jenis Usaha : 1. Usaha tani tanaman pangan 2. Usaha tani Hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian	5 Jenis Usaha : 1. Usaha tani tanaman pangan 2. Usaha tani Hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian
4.	Jumlah Pencairan	Rp.100.000.000,-	Rp. 253.690.000,-

RUK disusun berdasarkan RUA yang telah dibuat oleh petani anggota Gapoktan yang mengajukan pinjaman. RUK merupakan gambaran biaya yang diperlukan oleh keseluruhan anggota masing-masing kelompok yang selanjutnya direkap untuk dijadikan Rencana Usaha Kelompok. Rincian RUK diajukan oleh kelompok tani kepada pengurus Gapoktan meliputi rincian nama petani, usaha produktif, volume usaha dan biaya, nilai biaya. Penyusunan RUK dibuat oleh ketua kelompok dan kemudian diperiksa oleh Penyuluh Pendamping dan ditandatangani oleh ketua kelompok dan penyuluh pendamping. Dari hasil keseluruhan RUK, ketua Gapoktan dapat membuat RUB yang merupakan syarat Gapoktan untuk mendapat dana BLM-PUAP.

Pencairan dana BLM-PUAP untuk anggota Gapoktan Harapan Bundo di bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009. Namun karena pencairan dana dari Departemen Pertanian baru masuk ke rekening Gapoktan pada bulan Februari 2010, maka realisasinya baru mulai dilaksanakan pada bulan tersebut. Usaha produktif yang direncanakan oleh LKM-A Harapan Bundo yang akan didanai dengan dana BLM-PUAP, sesuai dengan rencana ada 5 (lima) jenis usaha Produktif yang akan didanai yaitu, Tanaman Pangan (Padi Sawah), peternakan, hortikultura (cabe dan bayam), pemasaran hasil pertanian (gabah, cabe dan bayam) dan industri rumah tangga. Secara ringkas pemanfaatan dana BLM-PUAP oleh anggota LKM-A dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rencana dan Realisasi pembiayaan anggota LKM-A berdasarkan jenis usaha.

Jenis Usaha	Rencana Pembiayaan		Realisasi Pembiayaan	
	Jumlah Orang	Jumlah Dana	Jumlah Orang	Jumlah Dana
1. Usaha tani padi Sawah	15 orang	Rp.46.875.000,-	31 orang	Rp.107.690.000,-
2. Pemasaran hasil pertanian	5 orang	Rp.15.625.000,-	9 orang	Rp.45.000.000,-
3. Usaha tani hortikultura	1 orang	Rp.3.125.000,-	3 orang	Rp.22.000.000,-
4. Peternakan	6 orang	Rp.18.750.000,-	9 orang	Rp.36.000.000,-
5. Industri RT	5 orang	Rp.15.625.000,-	13 orang	Rp.43.000.000,-
Total	32 orang	Rp.100.000.000,-	65 orang	Rp.253.690.000,-

Pemanfaatan dana oleh anggota untuk masing-masing jenis usaha untuk pengadaan faktor-faktor produksi, seperti untuk usaha tani padi sawah, anggota menggunakan dana ini untuk pembelian pupuk, benih, sewa lahan, upah tenaga kerja, tidak berbeda jauh dengan jenis usaha industri RT, pertanian hortikultura, peternakan, dan pemasaran hasil pertanian, secara ringkas pemanfaatan dana ini dapat dilihat pada Tabel 17 berikut :

Tabel 17. Pemanfaatan Dana PUAP oleh Anggota

No.	Jenis usaha	Uraian penggunaan dana untuk Usaha
1.	Usaha tani tanaman pangan yaitu padi sawah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian pupuk (Urea, TSP, KCL)</li> <li>- Penyediaan obat (Pestisida, insektisida.</li> <li>- Benih (30-45 Kg/ha)</li> <li>- Pembelian alat (Gasrok, Cangkul, bajak, traktor.</li> <li>- Biaya tenaga kerja luar keluarga.</li> </ul>
2.	Usaha tani tanaman hortikultura, yaitu usaha tani cabe dan bayam	<p>Tanaman cabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian benih dan bibit (petani ada yang membibitkan sendiri.</li> <li>- Penyediaan pupuk (TSP, Gandasil)</li> <li>- Peralatan pertanian seperti cangkul.</li> <li>- Pembelian insektisida dan pestisida.</li> </ul> <p>Tanaman bayam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian benih tanaman bayam</li> <li>- Pengadaan peralatan seperti cangkul, alat penyiram tanaman.</li> <li>- Pembelian pupuk dan pestisida.</li> </ul>
3.	Peternakan, yaitu ternak sapi jenis PO, itik, dan kambing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian bibit ternak sapi (bakalan) berumur 2 tahun yang akan dikembangbiakkan.</li> <li>- Pembuatan kandang</li> <li>- Pembelian induk ternak, obat dan makanan bagi ternak</li> </ul>
3.	Industri RT, seperti pabrik roti skala kecil, kue, keripik, kemplun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembelian bahan baku (tepung, ubi, dan ubi jalar).</li> <li>- Penyediaan bahan pendukung lainnya (gula, garam, vanili, perasa).</li> <li>- Biaya tenaga kerja luar keluarga.</li> </ul>
5.	Pemasaran hasil pertanian, yaitu heller beras, pemasaran bayam dan cabe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana pemasaran seperti pengepak barang dan kendaraan.</li> <li>- Pembuatan gudang beras untuk heller.</li> </ul>

Untuk peminjaman setiap jenis usaha seperti jenis usaha tanaman pangan dan pertanian hortikultura, pengembalian pinjaman diberi waktu sampai musim panen disertai dengan bunga pinjaman yang dihitung perbulan sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman, pinjaman dapat dibayar sesudah panen beserta bunganya, sedangkan untuk jenis usaha industri rumah tangga, peternakan, dan pemasaran hasil pertanian pembayaran cicilannya setiap bulan disertai dengan bunga pinjaman 1,5% dari jumlah pinjaman.

Menurut BPTP Sumatera Barat (2009), penggunaan dana PUAP adalah untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh petani agar pendapatan mereka meningkat dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan dana PUAP agar diprioritaskan pada usaha agribisnis yang mampu : 1) memberikan keuntungan yang relatif baik dan perolehan penerimaan dalam jangka pendek, dan 2) usaha yang memberikan nilai tambah. Usaha non budidaya seperti kegiatan pengolahan hasil (industri skala rumah tangga), pemasaran skala kecil dan usaha lain terkait sektor pertanian menjadi prioritas, karena usaha demikian bisa merupakan usaha tambahan dan lapangan kerja baru. Usaha budidaya tanaman berumur pendek (musiman) juga dapat dilakukan, bila dengan bantuan modal akan memberikan peningkatan hasil atau mutu hasil, hingga pada akhirnya pendapatan petani akan bertambah.

Kementerian Pertanian (2010), dalam modul pengembangan LKM-A menggambarkan prosedur permohonan pencairan yang terperinci sebaiknya dilakukan oleh pengelola LKM-A. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo, proses permohonan dan pencairan pinjaman oleh anggota sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian tersebut. Memang ada beberapa poin kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola, seperti tanda tangan kolom persetujuan dan pemeriksaan keabsahan dokumen. Kegiatan ini dilakukan oleh manajer umum LKM-A bersama ketua Gapoktan dengan disertai studi kelayakan usahanya. Jadi prosedur permohonan dan pencairan dana pinjaman di LKM-A Harapan Bundo ini juga melibatkan pengurus Gapoktan terutama ketua pengurus.

#### **4.3.2. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo.**

Secara konsep, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A ataupun Gapoktan penerima dana program BLM-PUAP dikeluarkan oleh Departemen Pertanian maupun BPTP Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo, panduan pencatatan dan pelaporan tersebut sudah dilaksanakan oleh pengelola LKM-A Harapan Bundo. Hal ini terwujud berkat adanya bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh PMT dan PPL.

Laporan yang dibuat oleh LKM-A Harapan Bundo dibuat dan dikirimkan secara reguler kepada tim teknis tingkat kabupaten, yang kemudian diolah dan dilaporkan oleh PMT ke tim teknis tingkat Provinsi dan tim teknis pusat. Secara umum, laporan-laporan tersebut meliputi :

1. Laporan Bulanan, yang berisi tentang laporan perkembangan dana PUAP tiap bulannya. Disamping itu, dalam laporan ini juga berisikan jumlah dan nama kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan, jumlah simpanan /tabungan anggota dan data-data lain. Laporan ini ditandatangani oleh ketua Gapoktan dan diketahui oleh ketua tim teknis tingkat kecamatan bersama wali nagari.
2. Laporan Tahunan. Laporan ini berisi tentang akumulasi pembiayaan selama satu tahun bersama jumlah bunga pembiayaan yang diperoleh LKM-A Harapan Bundo. Kemudian laporan ini juga berisi tabel pendapatan per bulan selama satu tahun, serta akumulasi pendapatan dan pengeluaran selama tahun kegiatan yang dilaporkan. Di Laporan ini juga berisi mengenai sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun tersebut. Laporan ini ditandatangani oleh ketua Gapoktan Harapan Bundo.
3. Buku Evaluasi (bulanan) kegiatan usaha Gapoktan tentang jalannya operasional LKM-A. Buku laporan ini berisi tentang evaluasi pembiayaan, tabungan, bunga yang diperoleh dari anggota, hasil evaluasi dan laporan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh LKM-A dalam mengelola dana BLM-PUAP. Buku evaluasi ini juga ditanda tangani oleh ketua Gapoktan.
4. Laporan LKM-A untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan ini berisikan tentang laporan rugi laba LKM-A selama satu periode, laporan

posisi kekayaan/modal bersih selama setahun, laporan pembiayaan berdasarkan jumlah anggota yang meminjam dan mengembalikan pinjaman selama setahun. Laporan ini dibuat oleh bagian administrasi pembukuan LKM-A, diketahui oleh manajer LKM-A dan disetujui oleh ketua Gapoktan.

Disamping laporan-laporan tersebut diatas, LKM-A Harapan Bundo juga membuat beberapa buah buku pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk membantu pengelola dalam memberikan informasi kepada anggota dan pihak-pihak yang membutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mempermudah kerja pengelola LKM-A dalam mengelola keuangan dan juga untuk menghindari kesalahan dalam membuat laporan-laporan yang dibutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut diantaranya :

- a. Buku data base anggota;
- b. Buku daftar anggota peminjam menurut jenis usaha;
- c. Buku profil LKM-A dan Gapoktan;
- d. Buku nama pengurus
- e. Buku simpanan anggota beserta kartu simpanan;
- f. Buku keuangan (kas harian, kas besar, jurnal umum)
- g. Buku nama anggota dan unit-unit usaha;
- h. Buku daftar hadir pengurus;
- i. Buku daftar hadir anggota.

Pencatatan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo sejauh ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dan analisa kelayakan usaha anggota serta kapan mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu, salah satu hal yang sangat penting yang menjadi pertimbangan LKM-A dalam memberikan pinjaman modal kepada anggota adalah perilaku dan karakter calon peminjam. Secara umum LKM-A dapat memenuhi kebutuhan anggota akan dana tersebut jika dikaitkan dengan kemampuan permodalan LKM-A Harapan Bundo saat ini. Namun karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh LKM-A, saat ini belum semua permohonan yang diajukan oleh anggota dapat dikabulkan dalam waktu cepat. Ditemukan ada 7 orang anggota yang harus menunggu dana masuk dari anggota lain untuk mendapatkan pinjaman, karena keterbatasan dana yang

tersedia dan setiap dana yang masuk dari anggota telah ada anggota lain yang lebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman untuk pembiayaan usahanya.

#### 4.3.3. Sistem dan Persyaratan Anggota untuk Meminjam

Tabel berikut ini menjelaskan isi dari masing-masing syarat yang diberikan pengelola LKM-A kepada Anggota yang ingin meminjam :

Tabel 18. Syarat yang harus dipenuhi Anggota LKM-A.

No.	Aspek Persyaratan	Komponen Persyaratan/keterangan
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Duplikat kartu tanda penduduk yang berlaku dijadikan syarat.
2.	Kartu Keluarga (KK)	Photo copy kartu keluarga yang di photo copy dan diberikan sebagai syarat.
3.	Surat Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi dari ketua Poktan</li> <li>- Biodata anggota</li> <li>- Biodata ketua Poktan</li> <li>- Tanda tangan yang menerima rekomendasi, ketua kelompok tani, ketua Gapoktan harapan Bundo (Lampiran 18).</li> </ul>
4.	Data permohonan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pribadi</li> <li>- Data usaha</li> <li>- Bantuan yang ada.</li> <li>- Kesanggupan mengangsur</li> <li>- Sumber pelunasan (Lampiran 19).</li> </ul>
5.	Surat persetujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Peminjam</li> <li>- Data suami/istri</li> <li>- Tanda tangan yang menerima persetujuan, yang membuat persetujuan, Ketua LKM-A (Lampiran 20).</li> </ul>
6.	Rencana Usaha Anggota (RUA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biodata anggota</li> <li>- Jenis usaha produktif</li> <li>- Kode usaha produktif</li> <li>- Volume usaha</li> <li>- Kebutuhan biaya</li> <li>- Jadwal permintaan (Lampiran 21).</li> </ul>
7.	Lampiran RUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama anggota</li> <li>- Jenis usaha</li> <li>- Volume usaha</li> <li>- Kebutuhan biaya</li> <li>- Rincian biaya (Lampiran 22).</li> </ul>

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011 (data diolah).

Pada tabel diatas dapat dilihat persyaratan yang harus dipenuhi anggota. Syarat berupa surat rekomendasi, data permohonan pembiayaan, surat persetujuan, Rencana Usaha Anggota (RUA) (Lampiran 18-22) terdapat persetujuan dari pihak keluarga anggota dan ketua Poktan sebagai penanggung jawab apabila nantinya peminjam bermasalah untuk mengembalikan pinjaman, ini merupakan tindakan antisipasi terjadinya kredit macet. Menurut anggota LKM-A, persyaratan ini tidak menyulitkan karena persyaratan ini diberikan oleh LKM-A dan diisi oleh anggota berdasarkan tuntunan dari pengelola LKM-A.

#### 4.3.4 Proses Dana Bergulir dalam Kelompok

LKM-A Harapan Bundo menggulirkan dana BLM-PUAP kepada anggota sesuai dengan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh anggota, dan beberapa pertimbangan dan kendala yang dihadapi LKM-A untuk mencairkan dan menggulirkan dana yang ada. Proses perguliran dana ini menurut pertimbangan dan kendala yang dihadapi terdapat dalam Tabel 19 berikut :

Tabel 19. Pertimbangan, Pelaksanaan dan Kendala Perguliran Dana BLM-PUAP kepada Anggota LKM-A Harapan Bundo.

Pertimbangan	Pelaksanaan	Kendala
Jumlah dana tersedia	Langsung digulirkan apabila ada dana	Ada pemohon yang harus menunggu dana tersedia
Analisa kelayakan usaha	Dilakukan oleh manajer LKM-A dan ketua Gapoktan Harapan Bundo	Tidak dilakukan dengan studi yang lebih mendalam
Waktu permohonan	Diterima sesuai dengan yang diajukan pemohon	Pencairan dana tidak bisa cepat, terkendala dana tersedia
Aspek perilaku dan karakter calon peminjam	Selalu menjadi pertimbangan	Tidak ada kendala karena pengelola mengetahui kondisi lokal.
Jumlah peminjam	2-23 orang perbulan	Jumlah dana yang tersedia di LKM-A Harapan Bundo.
Prosedur	Ada tambahan prosedur (berupa surat persetujuan wali/keluarga peminjam)	Tidak ada kendala

Berdasarkan laporan perkembangan dana BLM-PUAP yang dibuat oleh LKM-A Harapan Bundo, ditemukan bahwa hanya pada satu bulan diawal ditemukan jumlah anggota yang memperoleh pinjaman sebanyak 23 orang (Lampiran 3). Namun pada bulan-bulan berikutnya, paling banyak 8 orang peminjam yang dapat dibiayai dengan rata-rata pinjaman yang diberikan sebanyak Rp.2.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-.

Jika dilihat tingkat pengembalian anggota, hanya pada bulan Oktober sekitar Rp.38.000.000,-, dan jika dilihat kepada rata-rata pinjaman yang diberikan, maka LKM-A Harapan Bundo hanya mampu memberikan pinjaman kepada 1-8 orang anggota. Jika diakumulasikan selama tahun 2010, proses dana bergulir di LKM-A Harapan Bundo sudah mencapai 65 orang peminjam dengan total nilai dana yang telah bergulir sebesar Rp.253.690.000,-. Dana BLM PUAP ini dikembalikan oleh anggota dengan sistem cicilan selama masa pengembalian pinjaman termasuk jasa sebesar 15% dari jumlah pinjaman yang disepakati ketika akad peminjaman dana antara pengelola LKM-A dan pemohon. Berdasarkan laporan akumulasi bulanan Gapoktan Harapan Bundo tahun 2010 adalah sebanyak Rp.159.941.000,-(Lampiran 5), jika dibandingkan dana yang telah bergulir, tingkat pengembalian sudah mencapai 63,04%, selebihnya masih merupakan cicilan anggota yang belum membayar ke LKM-A.

Pengelola LKM-A Harapan Bundo melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi pinjaman bermasalah, seperti mewajibkan setiap peminjam membuat surat persetujuan dari wali/keluarga peminjam untuk meminjam di LKM-A Harapan Bundo, sehingga peminjam dan keluarganya bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut ke LKM-A Harapan Bundo. Apabila pertengahan bulan anggota belum mencicil pinjaman, maka pengelola LKM-A akan menagih kepada anggota sebelum akhir bulan dan jatuh tempo pengembalian.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola LKM-A Harapan Bundo, dipaparkan bahwa setiap dana pengembalian pinjaman yang diterima oleh LKM-A, apabila dana di kas LKM-A telah memenuhi jumlah permohonan anggota yang akan meminjam, maka dana tersebut akan digulirkan kepada anggota tersebut, sehingga tidak ada istilah dana yang mengendap di kas LKM-A Harapan Bundo.

Dana-dana tersebut seutuhnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Alasan inilah yang menyebabkan belum semua anggota yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman bisa dengan cepat memperoleh pinjaman tersebut.

#### 4.3.4 Fungsi Penyelia Mitra Tani dan Penyuluh Pendamping Lapangan dalam Pengelolaan Dana BLM-PUAP

Kontribusi PMT dan PPL dalam membina dan pendampingan LKM-A Harapan Bundo dalam berbagai aspek, baik aspek manajemen keuangan, organisasi, maupun sebagai penghubung bagi LKM-A Harapan Bundo ke tim teknis tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Pada LKM-A Departemen Pertanian khusus mengutus PMT dengan tugas yang dibebankan kepada PMT, sebagaimana dapat di lihat pada tugas dan tanggung jawab PMT pada Tabel 20, sebagai berikut :

Tabel 20. Tugas PMT di LKM-A Harapan Bundo

Tugas PMT	Rincian Tugas
1. Pelatihan manajemen usaha	Kewirausahaan, penyusunan cashflow, dari usaha tani/Peternak, Pengembangan pasar, informasi teknologi produksi, pengembangan jaringan usaha kerja.
2. Membantu perencanaan usaha petani/peternak di lokasi PUAP	Identifikasi jenis usaha yang prospektif, Identifikasi kapasitas produksi, Identifikasi potensi pasar, menyusun rencana usaha.
3. Fasilitas pengembangan LKM-A	Untuk membangun keswadayaan petani dalam membiayai usaha taninya maka insentif bahwa modal usaha PUAP diharapkan dapat dikelola oleh petani melalui mekanisme LKM-A.
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.	Monitoring perkembangan pendampingan secara berkala melalui berbagai strategi, evaluasi perkembangan pendampingan berkala setiap 3 bulan, dan Pelaporan setiap periode waktu.

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2010.

Departemen Pertanian memberikan pendampingan dan pembina kepada Gapoktan yang menerima dana BLM-PUAP, yaitu Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL). BPTP Sumatera Barat (2009) dalam petunjuk teknis pelaksanaan PUAP di Sumatera Barat menjelaskan bahwa PMT dan PPL mempunyai hubungan yang sangat krusial terhadap pengelolaan dana PUAP di LKM-A dan Gapoktan, terutama terkait dalam hal : 1) melatih dan membantu Gapoktan dalam membangun jejaring dan *stakeholders* dalam pengembangan unit usaha otonomnya; 2) Melakukan *crosscheck* data dan informasi tentang usaha-usaha pembiayaan PUAP yang dikelola oleh LKM-A; 3) PMT, penyuluh pendamping, pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A melakukan kunjungan dan koordinasi dalam rangka pemecahan yang dihadapi oleh Gapoktan maupun LKM-A; dan 4) membantu LKM-A dan Gapoktan dalam membangun dan memantau jejaring usaha yang dibiayai dengan dana PUAP.

Dari Table 20 dapat dilihat bahwa tugas dan kegiatan PMT di Gapoktan Harapan Bundo, bahwa fungsi PMT sangat berpengaruh terhadap kinerja LKM-A Harapan Bundo yang dibimbing dan dibina oleh PMT kota Padang. Bimbingan yang dilakukan PMT ini saat pembentukan RUA, RUK, dan RUB, untuk pemantauan PMT memantau sekali seminggu ke Gapoktan Harapan Bundo, sedangkan pelatihan terhadap anggota dan pengelola LKM-A dilaksanakan berdasarkan program dari Departemen Pertanian. Dengan adanya PMT, maka kerja dan fungsi LKM-A dalam mengelola dana BLM PUAP akan lebih terarah dan sesuai dengan panduan baku yang dibuat oleh Departemen Pertanian.

#### **4.4. Analisa Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam Mengelola Dana BLM-PUAP**

Berdasarkan Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang dikeluarkan Departemen Pertanian tahun 2005, dasar hukum LKM-A dalam pelaksanaan LKM-A adalah berdasarkan UU No.25/1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi, maka penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana BLM-PUAP dilakukan dengan alat ukur pedoman penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Mikro Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, yang akan dinilai meliputi :

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Liquiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jatidiri LKM-A

Berdasarkan neraca (Lampiran 11), laporan laba/rugi (Lampiran 23), laporan posisi kekayaan/modal bersih (Lampiran 24), dan laporan Sisa hasil usaha (SHU) (Lampiran 25) LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010 yang dilaporkan pengurus Gapoktan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2010, dan dipandu dengan pedoman perhitungan kinerja (Lampiran 7 dan 26), penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam menjalankan kegiatannya menurut 7 aspek tersebut adalah sebagaimana dalam pembahasan masing-masing aspek berikut ini :

#### **4.4.1 Permodalan**

Penilaian terhadap kinerja permodalan LKM-A Harapan Bundo berdasarkan beberapa aspek, yakni modal sendiri, total aset, modal tertimbang, Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan pinjaman yang diberikan beresiko. Modal sendiri adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana hibah. Modal tertimbang adalah hasil kali komponen modal dengan persentase bobot pengakuan resiko. ATMR adalah hasil kali komponen aktiva dengan bobot pengakuan resiko yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja. Dalam menilai permodalan hal yang dilihat adalah rasio modal sendiri terhadap total aset kemudian rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

**a. Rasio modal sendiri terhadap total aset.**

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa komponen modal sendiri berupa simpanan-simpanan LKM-A dan aktiva lancar dan aktiva tetap yang ada di LKM-A Harapan Bundo, lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 21 berikut :

Tabel 21. Komponen dan Jumlah Modal Sendiri, serta Total Aset

No.	Komponen Modal	Jumlah
1.	Simpanan pokok	Rp. 2.000.000,-
2.	Simpanan wajib	Rp. 3.080.000,-
3.	Simpanan tabungan	Rp. 1.580.275,-
4.	Dana BLM-PUAP	Rp.100.000.000,-
	Jumlah	Rp.106.660.275,-
1.	Aktiva tetap	
	- Laptop	Rp. 5.000.000,-
	- Inventaris (meja, kursi, lemari)	Rp. 1.890.000,-
2.	Aktiva lancar	
	- Kas	Rp. 10.690.292,-
	- Bank	Rp. 1.369.383,-
	- Pembiayaan anggota	Rp. 90.802.500,-
	Jumlah	Rp.109.752.175,-

Total aset terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, dan pembiayaan anggota. Sedangkan aktiva tetap terdiri dari inventaris berupa meja, kursi, laptop. Jumlah masing-masing pos dapat dilihat pada neraca LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010 (Lampiran 11). Maka perbandingan antara modal sendiri dan total aset adalah :

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\% = \frac{106.660.275,-}{109.752.175,-} \times 100\% = 97,18\%$$

Nilai 97,18% melebihi kapasitas rasio modal sendiri terhadap aset (berada pada kisaran angka antara 90 hingga 100), maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 6,0 yaitu skor tertinggi untuk standar penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset (Lampiran 7, bagian A, tabel 1). Modal sendiri yang dimiliki LKM-A Harapan Bundo meningkat drastis

karena adanya dana hibah berupa dana PUAP sebesar Rp.100.000.000,-. Dana PUAP tersebut mengakibatkan rasio pada aspek permodalan yang dikelola oleh LKM-A Harapan Bundo sampai dengan tutup buku tahun 2010 adalah sangat baik.

**b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko**

Jumlah modal sendiri dapat dilihat pada tabel 15. Jumlah pinjaman yang diberikan beresiko sebesar Rp.253.690.000,-. Pinjaman diberikan beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh LKM-A kepada peminjam yang tidak mempunyai anggunan yang memadai dan atau jaminan dari avalis atau pinjaman yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Anggota yang meminjam pada LKM-A Harapan Bundo tidak memakai anggunan, maka semua pinjaman yang diberikan kepada anggota penulis golongan kepada pinjaman yang beresiko. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan beresiko}} \times 100\% \\ &= \frac{106.660.275,-}{253.690.000,-} \times 100\% = 42,04\% \end{aligned}$$

Nilai 42,04% berada pada kisaran rasio modal 40% hingga 50% dengan nilai 50, karena untuk setiap kenaikan rasio modal 1% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100. Kemudian nilai 50 dikalikan dengan bobot 6%. Sehingga diperoleh skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko adalah 3,0 (Lampiran 7, Bagaian A, Tabel 1). Skor ini diperoleh karena jumlah modal sendiri yang ada jauh lebih kecil dari pinjaman yang diberikan oleh LKM-A Harapan Bundo selama tahun 2010. Apabila modal sendiri lebih besar dari jumlah pinjaman beresiko, maka LKM-A akan mempunyai kesempatan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain, sehingga dapat memberikan keuntungan lebih baik dibandingkan modal sendiri yang lebih kecil.

### c. Rasio kecukupan modal sendiri terhadap ATMR

Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara modal tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. Untuk membantu perhitungan ATMR dan modal tertimbang dibuatlah tabel perhitungan sebagaimana dalam Tabel 22 berikut ini :

Tabel 22. Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang (Rp.)
1.	a. Modal anggota			
	1. Simpanan pokok	2.000.000,-	100%	2.000.000,-
	2. Simpanan wajib	3.080.000,-	100%	3.080.000,-
	3. Simpanan tabungan	1.580.275,-	100%	1.580.000,-
	b. Modal hibah (PUAP)	100.000.000,-	100%	100.000.000,-
	c. SHU belum dibagi.	3.091.900,-	50%	1.545.950,-
	Jumlah			<b>108.205.950,-</b>
No.	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang (Rp.)
1.	Kas/Bank	12.059.675,-	0%	0
2.	Pinjaman yang diberikan kepada anggota	90.802.500,-	100%	90.802.500,-
3.	Aktiva tetap	6.890.000,-	70%	4.823.000,-
	Jumlah			<b>Rp.95.625.500,-</b>

Tabel di atas merupakan tabel perhitungan modal tertimbang yang akan digunakan untuk menghitung rasio kecukupan modal sendiri terhadap aktiva, sedangkan tabel di bawah ini merupakan tabel perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko.

Berdasarkan perhitungan modal tertimbang dan ATMR diatas, maka perhitungan terhadap aspek rasio kecukupan modal sendiri diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% = \frac{108.205.950,-}{95.625.500,-} \times 100\% = 113,15\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai rasio kecukupan modal sendiri sebesar 113,15% lebih dari 8%. Dengan demikian diperoleh nilai 100

dengan skor 3,00 (Lampiran 7, Bagian A, Tabel 2 dan Tabel 3). Skor 3,00 merupakan skor tertinggi untuk rasio kecukupan modal sendiri, dengan demikian, kecukupan modal sendiri setelah dihitung dengan bobot pengakuan resiko, kecukupan modal LKM-A Harapan Bundo adalah baik, karena nilai ini jauh melebihi standar nilai yang ada dalam panduan perhitungan rasio kecukupan modal sendiri. Aspek negatifnya adalah jumlah aktiva yang ada pada neraca LKM-A Harapan Bundo masih rendah, terutama jumlah pinjaman yang diberikan dan aktiva tetap yang ada saat ini.

#### 4.4.2 Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan LKM-A yang mendatangkan penghasilan bagi LKM-A yang bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan atas 4 rasio, yaitu rasio antara volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan, rasio antara resiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman yang bermasalah, dan BMPP terhadap calon anggota, lembaga keuangan lain dan anggotanya. Selanjutnya perhitungan terhadap 4 rasio tersebut dibahas secara terperinci sebagai berikut :

##### a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan.

LKM-A Harapan Bundo menyalurkan kredit hanya bagi anggota saja. Maka rasionya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.253.690.000,-}}{\text{Rp.253.690.000,-}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

(Catatan : Volume pinjaman yang diberikan 100% beresiko karena semua pinjaman yang diberikan tanpa anggunan).

Untuk rasio besar atau sama dengan 75% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 10%, maka menghasilkan nilai skor 10 (Lampiran 7, Bagian B, Tabel 1). Skor ini merupakan skor tertinggi dalam perhitungan volume pinjaman

yang diberikan. Jumlah kedua aspek yang dibagi tersebut sama karena saat ini LKM-A Harapan Bundo hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah terdaftar di LKM-A Harapan Bundo saja.

**b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan**

50% x Jumlah Pinjaman yang kurang lancar = 0

75% x Jumlah Pinjaman yang diragukan = 0

100% Jumlah Pinjaman macet = 0                      Jumlah = Rp.0,00,-

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.0,00,-}}{\text{Rp.253.690.000,-}} \times 100\% = 0\%$$

Nilai 0% mempunyai nilai kredit 100, karena setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 2 dengan maksimal nilai 100. Nilai 100 dikalikan dengan bobot 5% menghasilkan skor 5,0 (Lampiran 7, Bagian B, Tabel 1). Skor 5,0 merupakan skor yang paling tinggi untuk menilai rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Penilaian terhadap rasio ini bergantung kepada tingkat pinjaman bermasalah, baik kredit macet, diragukan maupun kurang lancar. Berhubung di LKM-A Harapan Bundo pada saat penelitian tidak ada pinjaman bermasalah, maka nilainya adalah 0 (nol). Sehingga nilai ini membuat nilai rasio volume pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan adalah baik.

**c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah.**

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\% = \frac{\text{Rp.0,00,-}}{\text{Rp.0,00,-}} \times 100\% = \approx\%$$

Nilai tak hingga persen ini merupakan akibat dari tidak adanya pinjaman yang bermasalah dengan cadangan resiko yang ada pada LKM-A Harapan Bundo. Sehingga nilai kredit rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah adalah 100. Kredit 100 dikalikan dengan bobot 5 sehingga menghasilkan skor 5 (Lampiran 7, Bagian B, Tabel 3). Skor 5 adalah skor tertinggi, sehingga rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah adalah baik.

#### d. BMPP kepada calon anggota, lembaga keuangan lain dan anggotanya

BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25% dari total dana yang siap dipinjamkan. Namun di LKM-A Harapan Bundo, pemberian pinjaman hanya boleh diberikan kepada pemohon yang telah resmi menjadi anggota Gapoktan Harapan Bundo dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota LKM-A Harapan Bundo. Maka dalam perhitungan rasio BMPP ini, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio BMPP} &= \frac{\text{BMPP}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.0,00,-}}{\text{Rp.253.690.000,-}} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Nilai 0 disini bukan dalam artian bahwa BMPP di LKM-A Harapan Bundo telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu 25%, namun disebabkan oleh pinjaman tidak diberikan kepada bukan anggota Gapoktan dan LKM-A Harapan Bundo, maka apabila rasio BMPP diperoleh kecil atau sama dengan 25%, dinilai dengan 100 dan dikalikan dengan bobot 5%, sehingga diperoleh skor 5,0 (Lampiran 7, Bagian B, Tabel 4).

#### 4.4.3 Manajemen

Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu, manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Lampiran 7, Bagian C, tabel 1).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Lampiran 7, Bagian C, Tabel 2).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Lampiran 7, Bagian C, Tabel 3).

d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0.3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Lampiran 7, Bagian C, Tabel 4).

e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Lampiran 7, Bagian C, Tabel 5).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap aspek manajemen dengan cara wawancara langsung dengan pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A Harapan Bundo, dan dengan bantuan daftar pertanyaan aspek manajemen (Lampiran 10), maka diperoleh hasil untuk masing-masing komponen sebagaimana pada Tabel 24 berikut :

Tabel 24. Hasil Penilaian Aspek Manajemen

No.	Aspek Manajemen	Skor
1.	Manajemen Umum	2,00
2.	Manajemen Kelembagaan	2,00
3.	Manajemen Permodalan	0,60
4.	Manajemen Aktiva	1,50
5.	Manajemen Liquiditas	2,40
	Jumlah	8,50

Dari Tabel 24 di atas maka hasil penilaian dari pemberian bobot masing-masing aspek, lalu kita bandingkan dengan standar penilaian aspek manajemen pada lampiran 7 Bagian C. Penilaian ini berdasarkan dari manajemen yang ada di LKM-A Harapan Bundo. Hasil penilaian aspek manajemen untuk LKM-A Harapan Bundo memperoleh skor 8,50 melewati 50% dari standar nilai aspek manajemen yaitu 15,00, maka LKM-A Harapan Bundo sudah mengatur dan mengelola aspek manajemen dengan baik.

#### 4.4.4 Penilaian Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi LKM-A Harapan Bundo didasarkan kepada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio diatas menggambarkan sampai seberapa besar LKM-A Harapan Bundo mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Berdasarkan cara perhitungan masing-masing rasio yang telah dipaparkan pada metode penelitian, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto**

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\% \\ &= \frac{14.530.900,-}{17.622.800,-} \times 100\% = 82,46\% \end{aligned}$$

Nilai rasio yang diperoleh adalah 82,46%, berada pada rentang rasio 70 hingga 85 (Lampiran 7, Bagian D, Tabel 1) maka nilainya 75 dengan skor 3,00. Skor ini menggambarkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh LKM-A Harapan Bundo masih sebanding dan dapat dipenuhi oleh partisipasi atau pendapatan yang diperoleh LKM-A dari anggotanya.

**b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset**

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 6.890.000,-}}{\text{Rp.109.752.175}} \times 100\% = 6,28\% \end{aligned}$$

Rasio 6,28% berada dalam rentang 0 hingga 25 (Lampiran 7, Bagian D, Tabel 2), sehingga nilainya adalah 100 dengan skor 4,0. Aktiva tetap (inventaris) yang saat ini dimiliki oleh LKM-A Harapan Bundo masih sedikit, sehingga jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, dengan dilihat kepada standar yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah aktiva tetap nilainya lebih kecil dari total aset yang dimiliki.

### c. Rasio efisiensi pelayanan

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.2.900.000,-}}{\text{Rp.253.690.000,-}} \times 100\% = 1,14\% \end{aligned}$$

Rasio efisiensi pelayanan adalah 1,14% berada pada rentang rasio kecil atau sama dengan 5, diperoleh nilai 100 dengan skor 2,0 (Lampiran 7, Bagain D, Tabel 3). Melihat skor yang diperoleh LKM-A Harapan Bundo tentang rasio efisiensi pelayanan, maka nilai ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo sudah sangat efisien. Biaya pelayanan yang diberikan hanya 1,14% jika dibandingkan dengan total pinjaman (pelayanan) yang diberikan kepada anggota. Apabila nilai biaya pelayanan semakin besar dan jumlah pinjaman tetap atau semakin kecil, maka berarti pelayanan tersebut semakin tidak efisien.

#### 4.4.5 Likuiditas

Analisa rasio likuiditas adalah alat analisis yang dilakukan terhadap kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Hal-hal yang menjadi penilaian adalah rasio kas dan rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima oleh LKM-A Harapan Bundo selama tahun 2010. Berdasarkan neraca LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010 dan laporan laba/rugi, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

##### a. Rasio Kas

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{10.690.292,-+1.369.383,-}{0} \times 100\% = \approx \% \end{aligned}$$

Dalam neraca per 31 Desember 2009, LKM-A Harapan Bundo belum mempunyai kewajiban lancar (simpanan berjangka), sehingga nilainya 0. Perhitungan terhadap rasio kas diatas menghasilkan nilai  $\approx$  %, karena skor untuk rasio  $\approx$  % tidak ada, maka untuk kepentingan perhitungan ini rasio kas diberi skor

0 (Lampiran 7, Bagian E, Tabel 1). Untuk meningkatkan nilai rasio ini, maka yang harus dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo adalah menggiatkan usaha simpanan yang telah direncanakan di awal tahun 2010.

#### b. Rasio pinjaman terhadap dana yang diterima

Modal yang dimiliki LKM-A Harapan Bundo merupakan modal sendiri yang berasal dari anggota dan modal penyertaan dari pemerintah yaitu dana BLM-PUAP yang merupakan dana yang diterima LKM-A.

Tabel 25. Dana yang Diterima

No.	Aspek	Jumlah
1.	Modal sendiri	Rp. 6.660.275,-
2.	Modal Penyertaan PUAP	Rp.100.000.000,-
	Jumlah	Rp.106.660.275,-

Sumber : LKM-A Harapan Bundo (data diolah)

Sedangkan selama tahun 2010, pinjaman yang telah diberikan kepada anggota adalah Rp. 253.690.000,-, sehingga perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Volume pinjaman}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.253.690.000,-}}{\text{Rp.106.660.275,-}} \times 100\% = 237,85\% \end{aligned}$$

Rasio pinjaman terhadap dana yang diterima diperoleh sebesar 237,85%, berada pada rentang rasio antara 200 hingga 300 (Lampiran 7, Bagian E, tabel 2), dengan nilai 75 dan skornya adalah 3,75. Dari data diatas dapat dilihat bahwa semakin meningkat pinjaman yang dapat diberikan oleh LKM-A Harapan Bundo, maka nilai rasio yang diperoleh akan meningkat. Jadi peningkatan volume pinjaman ini juga meningkatkan penilaian terhadap kinerja LKM-A Harapan Bundo nantinya.

#### 4.4.6 Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan LKM-A, didasarkan pada 3 rasio, yaitu:

##### a. Rasio rentabilitas aset

Rasio Rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{SHU sebelum bunga dan Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.3.091.900,-}}{\text{Rp.109.752.175,-}} \times 100\% = 2,82\% \end{aligned}$$

Besaran rasio rentabilitas aset yang diperoleh sebesar 2,82% berada pada rentang < 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75 (Lampiran 7, Bagian F, Tabel 1). Skor yang diperoleh untuk rasio rentabilitas aset ini sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada tahun yang bersangkutan, LKM-A Harapan Bundo baru bisa menghasilkan SHU sebesar Rp.3.091.900,-. Peningkatan nilai SHU, sangat berpengaruh terhadap perhitungan kinerja LKM-A dalam melihat kemandirian dan pertumbuhannya.

##### b. Rasio rentabilitas modal sendiri

Berdasarkan ketentuan dan neraca LKM-A Harapan Bundo, maka perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri (ekuitas) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.309.190,-}}{\text{Rp.106.660.275,-}} \times 100\% = 0,29\% \end{aligned}$$

SHU bagian anggota dalam perhitungan diatas merupakan SHU yang telah disisihkan sebesar 10% dari total SHU selama tahun 2010. SHU bagian anggota ini masih berupa tabungan, yang nantinya akan dibagikan menurut persentase simpanan masing-masing anggota. Dari penghitungan terhadap rasio rentabilitas modal sendiri diatas, diperoleh rasio sebesar 0,29%, berada pada rentang rasio kurang dari 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75 (Lampiran 7, Bagian F,

Tabel 2). Perhitungan rasio ini sama kondisinya dengan perhitungan rasio rentabilitas aset, sangat dipengaruhi oleh jumlah SHU yang dihasilkan oleh LKM-A Harapan Bundo pada tahun 2010, sehingga skor yang diperoleh sangat rendah.

### c. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu SHU yang dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{SHU kotor}}{\text{Beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.3.091.900,-}}{\text{Rp.14.530.900,-}} \times 100\% = 21,28\% \end{aligned}$$

Rasio kemandirian operasional diperoleh sebesar 21,28% berada pada rentang rasio kurang dari 100% mendapat nilai 0, dengan skor 0 (Lampiran7, Bagian F, Tabel 3). Skor ini diperoleh karena terlalu kecilnya perbandingan antara SHU kotor dengan beban usaha selama tahun 2010 yang ditanggung oleh LKM-A Harapan Bundo. Jika dilihat dari lapangan, kemandirian dalam operasional lapangan ini memang belum bisa dicapai oleh LKM-A Harapan Bundo, karena dalam perjalanannya dalam mengelola dana PUAP perlu mendapat bantuan dari pihak lain terutama modal. Dengan modal ini tentunya akan berimbas kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh LKM-A Harapan Bundo, sehingga juga akan meningkatkan perolehan SHU.

#### 4.4.7 Jati Diri LKM-A Harapan Bundo

Penilaian aspek jati diri LKM-A ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan LKM-A dalam mencapai tujuannya. Aspek penilaian jati diri ini menggunakan 2 rasio, yaitu:

##### a. Rasio partisipasi bruto

Partisipasi bruto merupakan akumulasi dari pendapatan yang diterima oleh LKM-A Harapan Bundo yang berasal dari usaha-usaha yang dijalankannya selama tahun 2010. Pendapatan-pendapatan tersebut berupa pendapatan biaya administrasi yang dibayarkan anggota, jasa usaha pembiayaan. Berdasarkan

laporan laba/rugi LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010, jumlah pendapatan bruto adalah Rp. 17.622.800,-. Sedangkan volume pinjaman selama tahun 2010 adalah Rp. 253.690.000,-, sehingga penghitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.17.622.800,-}}{\text{Rp.253.690.000,-}} \times 100\% = 6,95\% \end{aligned}$$

Rasio yang diperoleh dari perhitungan diatas adalah 6,95% berada pada rentang kecil dari 25% sehingga nilai 0 dan skornya juga 0 (Lampiran 7, Bagian G, Tabel 1). Perbandingan partisipasi bruto (pendapatan) yang diperoleh oleh LKM-A Harapan Bundo tahun 2010 ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan volume pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dari anggota masih sangat rendah, maka rasio ini menghasilkan nilai yang sangat rendah.

#### **b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Dalam penghitungan rasio promosi ekonomi anggota, dengan menjumlahkan MEP3 (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) diasumsikan besarnya Rp. 750.000,- dan SHU bagian anggota. Jumlah MEP3 merupakan standar nilai yang ditetapkan dalam pedoman penilaian kesehatan koperasi yang menjadi acuan bagi penulis. Sehingga penghitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasionya} &= \frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{simpanan Wajib}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.750.000,-} + \text{Rp.309.190,-}}{\text{Rp.2.000.000,-} + \text{Rp.3.080.000,-}} \times 100\% = 20,85\% \end{aligned}$$

Rasio PEA yang diperoleh ini berada pada rentang > 10, dengan nilai 100, dan memperoleh skor tertinggi yaitu 3,0 (Lampiran 7, Bagian G, Tabel 2). Untuk lebih meningkatkan skor ini maka SHU harus ditingkatkan oleh pengelola LKM-A. Penilaian untuk jati diri LKM-A Harapan Bundo dalam hal pencapaian tujuan usaha pembiayaan dengan pinjaman yang diberikan kepada anggota dan

pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut, belum maksimal karena dari standar penilaian untuk jati diri LKM-A yaitu 10,00 sedangkan LKM-A Harapan Bundo hanya memperoleh 4,00 masih rendah dibandingkan dengan standar penilaian yang telah ditetapkan

Berdasarkan tujuan LKM-A yaitu menjadi suatu lembaga pembiayaan petani yang ditumbuh kembangkan di daerah perdesaan, dengan memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses permodalan yang dibutuhkan untuk usahanya. LKM-A juga bertujuan menumbuhkembangkan usaha pembiayaan agar dapat berkembang, dan dapat lebih banyak membiayai petani anggota, maka untuk penilaian jati diri LKM-A, harus menyeimbangkan antara peningkatan SHU dan pemberian pinjaman kepada petani anggota.

#### **4.4.8 Penetapan Tingkat Kesehatan (Kinerja) LKM-A Harapan Bundo**

Berdasarkan aspek-aspek penilaian kesehatan LKM-A Harapan Bundo yang mempedomani tatacara penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) atau usaha simpan pinjam (USP) yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah, maka akumulasi dari semua aspek tersebutlah yang menjadi dasar penetapan tingkat kesehatan (kinerja) LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana anggota terutama dana program PUAP. Jumlah skor keseluruhan aspek diatas selanjutnya dibandingkan dengan predikat tingkat kesehatan LKM-A, yang dibagi ke dalam 5 penggolongan, yaitu: **sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat**. Maka masing-masing aspek akan dibandingkan dengan standar penilaian yang telah ditetapkan, maka untuk penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo diperoleh skor secara keseluruhan menurut pedoman Permenneq KUKM 2008, sebagaimana pada Tabel 20 dibawah ini.

Tabel 26. Hasil Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A Harapan Bundo

No.	Aspek Penilaian	Skor	Standar
1	2	3	4
1.	Permodalan		
	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal	6,00	6,00
	b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko	3,00	6,00
	c. Rasio modal sendiri terhadap ATMR	3,00	3,00
	Jumlah	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>
2.	Kualitas aktiva produktif :		
	a. Rasio vol.pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman	10,00	10,00
	b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap vol.pinjaman	5,00	5,00
	c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah	5,00	5,00
	d. Rasio BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman.	5,00	5,00
	Jumlah	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
3.	Manajemen :		
	a. Manajemen umum	2,00	3,00
	b. Manajemen kelembagaan	2,00	3,00
	c. Manajemen permodalan	0,60	3,00
	d. Manajemen aktiva	1,50	3,00
	e. Manajemen likuiditas	2,40	3,00
	Jumlah	<b>8,50</b>	<b>15,00</b>
4.	Efisiensi :		
	a. Rasio biaya operasional terhadap partisipas bruto	3,00	4,00
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset	4,00	4,00
	c. Rasio efisiensi pelayanan	2,00	2,00
	Jumlah	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>
5.	Likuiditas :		
	a. Rasio Kas	0,00	10,00
	b. Rasio pemberian pinjaman terhadap dana yang diterima	3,75	5,00
	Jumlah	<b>3,75</b>	<b>15,00</b>
6.	Kemandirian dan pertumbuhan		
	a. Rentabilitas aset	0,75	3,00
	b. Rentabilitas modal sendiri	0,75	3,00
	c. Kemandirian operasional	0,00	4,00
	Jumlah	<b>1,50</b>	<b>10,00</b>
7.	Jatidiri LKM-A		
	a. Rasio partisipasi bruto	1,00	7,00
	b. Rasio PEA	3,00	3,00
	Jumlah	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>Total</b>	<b>63,75</b>	<b>100</b>

Hasil penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam Tabel 26 diatas, terlihat, bahwa ada tiga aspek yang memperoleh nilai rendah, yaitu aspek kemandirian dan pertumbuhan LKM-A dan Jati Diri LKM-A Harapan Bundo masih memperoleh skor yang rendah dari standar yang ditetapkan dalam penilaian kinerja koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menjadi acuan penulis dalam melakukan analisis kinerja LKM-A Harapan Bundo, maka diperoleh hasil penilaian kinerja LKM-A ini adalah **cukup sehat**, yaitu dengan skor **63,75** yang berada diantara rentang skor 60 hingga 80 (Tabel 5). Hal ini menunjukkan walaupun LKM-A Harapan Bundo masih baru dan memprioritaskan petani kecil dengan skala usaha mikro, namun telah mampu menjalankan fungsi LKM-A sebagai pengelola dana masyarakat dengan baik. Namun, pengelola LKM-A Harapan Bundo maupun pengurus Gapoktan Harapan Bundo harus memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Kekurangan-kekurangan yang penulis maksud disini adalah beberapa aspek krusial yang bisa membuat rendahnya penilaian pihak lain terhadap kinerja LKM-A Harapan Bundo. Diantaranya adalah rendahnya rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh SHU yang dihasilkan oleh LKM-A Harapan Bundo selama tahun 2010 masih kecil dibandingkan asset yang dimiliki. Hal ini dapat dimaklumi oleh semua pihak karena LKM-A Harapan Bundo baru mulai beroperasi pada bulan Februari 2010. Kemudian anggota LKM-A Harapan Bundo adalah khusus petani. Dalam pengajuan kredit pun anggota tidak dibebankan angsuran, sehingga kalau dilihat pada awalnya, LKM-A ini sulit untuk mempertahankan kinerjanya dalam melayani anggota.

Pada aspek likuiditas rasio kas terhadap kewajiban lancar di LKM-A Harapan Bundo juga sangat rendah ini disebabkan simpanan yang telah direncanakan sebagai kewajiban lancar LKM-A ini belum terlaksana, sehingga skor rasio kas  $\approx 0\%$ , maka untuk memperbaiki aspek ini maka pengelola LKM-A

Harus menggiatkan usaha simpanan yang telah direncanakan. Aspek kemandirian dan pertumbuhan, rasio rentabilitas aset dan rasio rentabilitas modal sendiri juga memperoleh skor yang sangat rendah dari standar skor yang telah ditetapkan. Maka untuk mengatasi masalah ini, pengelola LKM-A Harapan Bundo harus meningkatkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh di akhir tahun untuk menyeimbangkan rasio SHU dengan total aset dan modal sendiri.

Lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai perantara uang antara penabung atau penyimpan dengan peminjam, harus dikelola secara hati-hati dan memenuhi norma-norma kesehatan lembaga keuangan. Adanya kecerobohan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro yang potensial dapat berdampak terhadap kerugian yang meluas. Kerugian LKM-A dapat berakibat kepada ketidakmampuan LKM-A mengembalikan dana yang disimpan anggota atau nasabah pada LKM-A tersebut, sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan terhadap masyarakat penabungnya. Dampak lebih lanjut adalah citra buruk LKM-A, sehingga menghambat atau mengganggu operasi dan pengembangan LKM-A secara keseluruhan. Karena itu, LKM-A perlu dimonitor atau diawasi secara lebih ketat karena pada satu sisi kelangsungan usaha simpan pinjam sangat tergantung pada citra baik dan kepercayaan masyarakat, dan pada sisi yang lain berpotensi merugikan masyarakat luas, yaitu penabung (Atmadja Prijadi, 2003).

Sehat tidaknya suatu lembaga keuangan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan ditingkat petani sebagai anggota dan masyarakat pada umumnya. Karena lembaga keuangan tidak hanya menyalurkan dana dari masyarakat, namun juga menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat inilah sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Tingkat kesehatan (kinerja) yang baik ini sangat meningkatkan citra lembaga keuangan mikro dikalangan perbankan, sehingga kepercayaan perbankan pada lembaga keuangan mikro akan semakin baik. Secara umum tujuan dari penilaian kesehatan (kinerja) suatu lembaga keuangan mikro adalah untuk memastikan keadaan informasi data yang disajikan oleh LKM-A itu sendiri, untuk mengetahui ketaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui sistem pengamanan harta/kekayaan/aset LKM-A

yang bersangkutan, dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bidang-bidang yang mengandung kelemahan.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2008), tujuan dari pelaksanaan penilaian kesehatan terhadap suatu KSP/USP adalah agar KSP/USP tersebut dapat melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, penuh kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Jika dikaitkan dengan penilaian kinerja LKM-A Harapan Bundo, penilaian ini juga dapat menghasilkan suatu kriteria yang tepat bagi LKM-A Harapan Bundo, apakah sesuai dengan perkembangan dana BLM-PUAP yang dikelolanya pada tahun 2010 ini, terbaik di tingkat Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, hasil penilaian ini juga dapat memperlihatkan aspek-aspek apa saja yang menjadi kelemahan dari LKM-A Harapan Bundo, sehingga dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kinerja pada masa selanjutnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM PUAP oleh LKM-A Harapan Bundo, secara umum telah merujuk kepada petunjuk-petunjuk seperti petunjuk pelaksanaan PUAP, pedoman umum pelaksanaan, dan petunjuk teknis tingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Pembinaan dan pendampingan pengelola LKM-A Harapan Bundo secara bersama dilaksanakan oleh tenaga Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Kontribusi dari PMT, PPL, dan komitmen pengelola LKM-A bersama pengurus Gapoktan, koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan pengelolaan LKM-A Harapan Bundo. Ada perbedaan antara rencana dan realisasi dalam hal pencairan dan penggunaan dana, yang disebabkan karena keterlambatan pencairan dana dari pusat ke rekening Gapoktan, pertimbangan pengelola terhadap usaha yang diusulkan anggota, dan pertimbangan aspek sosial perilaku calon peminjam.
2. Kinerja (internal manajemen) LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana program BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan KSP/USP yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, dinilai **cukup sehat** dengan **skor 63,75**. Ini berarti bahwa LKM-A Harapan Bundo selama ini bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan bersama yang digariskan dalam AD/ART LKM-A Harapan Bundo. Selama beroperasi Tahun 2010 LKM-A Harapan Bundo telah mampu memperoleh SHU sebesar Rp. 3.091.900,- (Lampiran 25). Tingkat kesehatan yang cukup baik, ini diperoleh karena tidak adanya kredit macet pada pengelolaan pembiayaan LKM-A Harapan Bundo, karena untuk menekan dan mencegah terjadinya kredit macet tersebut, pengelola bersama pengurus Gapoktan

melakukan pendekatan yang cukup baik kepada anggotanya dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi agar tidak terjadi pinjaman bermasalah, seperti mewajibkan kepada anggota untuk membuat surat persetujuan wali/keluarga, menimbang perilaku dan karakter peminjam. Pengelola juga mengantisipasi dengan mengingatkan anggota untuk membayar cicilan ke LKM-A, dan juga dibentuknya BPK (Badan Penyelamat Keuangan) di tingkat Gapoktan, yang berfungsi untuk membina anggota termasuk usaha-usahanya agar tidak mengalami kendala dalam membayar angsuran pinjaman kepada LKM-A Harapan Bundo.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pokok kesimpulan diatas, dan terkait dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa saran kepada LKM-A Harapan Bundo secara umum. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Disarankan agar LKM-A Harapan Bundo, memperluas jenis-jenis usaha yang akan dikelola anggota, mempertegas aturan-aturan kerja untuk pengelola LKM-A Harapan Bundo dan menetapkan standar jumlah dana yang akan dipinjamkan kepada anggota, agar tidak terjadi perbedaan hak masing-masing anggota LKM-A. Disarankan juga agar pengelola LKM-A Harapan Bundo meningkatkan kerjasama dan mau belajar kepada lembaga perbankan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola LKM-A mengenai manajemen pengelolaan perbankan.
- 2) Disarankan juga LKM-A Harapan Bundo agar memperhatikan peningkatan partisipasi bruto anggota karena nilai saat ini hanya 1,00 (satu,nol), karena rendahnya pendapatan yang diterima oleh LKM-A Harapan Bundo pada Tahun 2010, dan untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan hanya memperoleh skor 1,50 (satu, lima nol) ini disebabkan karena Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2010 sangat rendah. Untuk kedepannya, agar kinerja LKM-A Harapan Bundo menjadi lebih baik, perlu adanya peningkatan pendapatan bruto, manajemen permodalan dan pelaksanaan usaha simpanan-simpanan yang telah direncanakan dengan cara merealisasikan rencana simpanan yang telah dibuat di Rapat Anggota Tahunan. Keberadaan LKM-A Harapan Bundo sangat berpotensi. Oleh sebab itu diperlukan dukungan

dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Dukungan yang saat ini sangat mendesak bagi LKM-A Harapan Bundo adalah penambahan modal untuk usaha-usahanya, terutama dalam hal pembiayaan. Sehingga keluhan-keluhan petani anggota tentang ketidaktepatan waktu dan ketersediaan dana di LKM-A Harapan Bundo dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, widodo. 2009. *Dana Rp. 100 Juta untuk PUAP*.  
<http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=comcontent&view=articid=279%3Adanarp100jutauntukpuap&catid=208%Aberitapertanian&Itemid=221>. [11/03/2010].
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (2):146- 164.
- Atmadja, Prijadi. 2003. *Model Pemeringkatan Koperasi : Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi*.  
[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_Infokop/EDISI%2024/prijadi.htm](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2024/prijadi.htm)  
[16/04/11]
- [BPS] Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2010.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 30 hal.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2009. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 47 hal.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2004. *Ketahanan Pangan dan Penyedia Lapangan Kerja* : Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2005. *Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*: Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2007. *Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)* : Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2008. *Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP*. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2009. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 27 hal.

- [Deptan] Departemen Pertanian. 2009. *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 36 hal.
- Gapoktan Harapan Bundo, 2010. *Laporan Tahunan LKM-A Harapan Bundo*. Kec. Kuranji. Kota Padang.
- Gapoktan Harapan Bundo, 2009. *Profil Gapoktan Harapan Bundo Kel.Lubuk Lintah. Kec. Kuranji*. Kota Padang
- Hendayana, R dan Bustamam, S. 2008. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dana Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan*. [http://pse.litbang.go.id/ind/pdf/files/Semnas4Des07\\_MP\\_A\\_Rachmat.pdf](http://pse.litbang.go.id/ind/pdf/files/Semnas4Des07_MP_A_Rachmat.pdf). [18/02/2011]
- Iqbal, Muhammmad dan Darwis, Valeriana. 2006. *Kebijakan Pengembangan Sistem Pembiayaan Pertanian dengan Pola Badan Layanan Umum (BLU)*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (4): 268-280.
- Ismawan, Bambang. 2003. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*. Jurnal ekonomi Rakyat. ArtikelTh.IINo.1. <http://www.ekonomirakyat.org/edisi13/artikel1htm>. [18/02/2011].
- Kementerian, Pertanian, 2010. *Modul Pengembangan LKM-A*. Kementerian Pertanian, Jakarta. 30 hal.
- Kementerian, Pertanian, 2010. *Petunjuk Teknis Pemeringkatan (rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*. Kementerian Pertanian, Jakarta. 25 hal.
- Munawir. 2000. *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2008. *Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP*. Permenneq KUKM. Jakarta. 45 hal.
- Nazir, Moh, 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Herlina Erawati. 2008. *Analisis Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Anggota (Studi Kasus : KSU LKM-A Sukma Karsa Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 138 hal.

- Sumodiningrat, G. 2003. *Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan dalam Perguliran Dana Sebagai Modal Usaha*. <http://suniscome.50webs.com/data/download/00%20Optimalisasi%20UPKD.pdf>. [3/01/2011].
- Suyatno, Thomas *et al.* 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, Thomas *et al.* 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 126 hal.
- Wadi, Syahrul. 2010. *Analisis Fungsi LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam Mengelola dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 141 hal.
- Wijono, W. W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sakah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo1.pdf>. [18/02/2010].

## Lampiran 1. Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana PUAP

NO	Nama Gapoktan	Kelurahan	Kecamatan	Pengurus		
				Ketua	Sekretaris	Bendahara
<b>TAHAP I</b>						
1.	Jaya Bersama	Batipuh Panjang	Koto Tengah	Hamzah	Hanafi	Nilawani
2.	Agro Floris	Lb.Minturun S. lareh	Koto Tengah	Jamaris	Syafruddin	Darmiwilis
3.	Harapan Bersama	Limau Manih	Pauh	Yuherman	Maizan	Nurhayati
4.	Harapan Jaya	Gurun Laweh	Nanggalo	Ramli RB	Mukhlis	Adek
5.	<b>Harapan Bundo</b>	<b>Lubuk Lintah</b>	<b>Kuranji</b>	<b>Yulisman</b>	<b>Firdaus Syam</b>	<b>Lasmitasari</b>
6.	Batu Gadang Bersama	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	Basri Dt. Rj Usali	Gustina	Yumasri
7.	Sepakat	Kurao Pagang	Nanggalo	Jumlisman	Yumasri	Nurhayati.
<b>TAHAP II</b>						
1.	Fajar Mahkota	Koto Panjang ikur Koto	Koto Tengah	Hafardi	Afrizal	Harni Daswita
2.	Ceno Pulai	Koto Pulai	Koto Tengah	Jafrizal, SPT	Drs.Yurman	Masdaneli
3.	Ambacang Sakato	Pasar Ambacang	Kuranji	Chandra EP	Azwarman	Nurbaiti
4.	Sungai Sapih Jaya	Kel. Sungai Sapih	Kuranji	Desrizal	Zainal Hakim	Nuriya, Spd
5.	Sarik Sati	Gunung Sarik	Kuranji	Zalmadi	Hasan Basri Karim	Fauziati
6.	Sarumpun Boneh	Surau Gadang	Nanggalo	Zainal	Yulia Berti	Burhan
7.	Sejahtera	Kalumbuk	Kuranji	Erman R	Suardi	Zarkasi
8.	Cupak Sepakat	Cupak Tengah	Pauh	Syamsu wirman	Asrul Wahab Rj. Mangkuto	Bustami
9.	Pisang Sakato	Pisang	Pauh	Masrizal	Ali nursal	Syahrial Sibar
10.	Kapalo Koto Basamo	Kapalo Koto	Pauh	Zainal, RS	Desmawati	M.Yusuf
11.	Minang Sakato	Lambung Bukit	Pauh	Irman, SE	Jonaidi	Suar Taher
12.	Tigo Sarimpun	Panggambiran Ampalu Nan XX	Lb. Bagalung	Syafrizal, SE	Ir. Sugianto	Alwis
No.	Nama / NIP		Pangkat / Gol		Jabatan	
<b>Tahap I</b>						
Alimin, SP NIP. 410028314			Penata Muda III a		Penyuluh Pertanian Kel. Batipuh Panjang	
Yuharmilis, SPT NIP.080094700			Penata Muda III a		Penyuluh Pertanian Kel.Lb.Minturun S. Lareh	
Syaiful Akamam NIP. 080106322			Penata Muda III a		Penyuluh Pertanian Kel. Limau Manih	
Dardanelly NIP.080106322			Penata Muda III a		Penyuluh Pertanian Kel. Gurun Lareh	
<b>Yulia Agus NIP.080092764</b>			<b>Pengatur II c</b>		<b>Penyuluh Pertanian Kel. Gurun Lareh</b>	
Zulfahmi			-		THL – TB Kel. Batu Gadang	

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nanggalo Kota Padang

## Lampiran 2 . Rincian Kelompok Tani Penerima PUAP

No.	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Jumlah anggota (Orang)	Nilai (RP)
1.	Saiyo Sakato	Peternakan, padi sawah, pemasaran, industri RT, dan hortikultura	15	Rp.40.280.000,-
2.	Kandang Batu Sakato	Peternakan, padi sawah, pemasaran, industri RT, dan hortikultura	11	Rp.39.665.000,-
3.	Kampung Kalawi Timur	Peternakan, padi sawah, pemasaran, industri RT, dan hortikultura	6	Rp.20.055.000,-
	Jumlah		32	Rp.100.000.000,-

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011.

## Lampiran 3. Perkembangan Dana BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo

No.	Bulan/tahun 2010	Jumlah anggota yang didanai (Orang)	Dana yang pinjaman/bulan (Rp).	Jumlah Dana (Rp).	Pertumbuhan (%)
1.	Februari	23 orang	85.060.000,-	85.060.000,-	
2.	Maret	4 orang	18.410.000,-	103.470.000,-	21,64%
3.	April	2 orang	12.020.000,-	115.490.000,-	11,62%
4.	Mei	3 orang	3.500.000,-	118.990.000,-	3,03%
5.	Juni	8 orang	20.600.000,-	139.590.000,-	17,31%
6.	Juli	8 orang	28.400.000,-	167.990.000,-	20,34%
7.	Agustus	2 orang	11.500.000,-	179.490.000,-	6,85%
8.	September	1 orang	3.500.000,-	182.990.000,-	1,95%
9.	Oktober	2 orang	7.200.000,-	190.190.000,-	3,94%
10.	November	6 orang	38.000.000,-	228.190.000,-	19,99%
11.	Desember	6 orang	25.500.000,-	253.690.000,-	11,17%

Sumber : LKM-A Harapan Bundo 2011. (data diolah).

## Lampiran 4. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana PUAP.

No.	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Jadwal Pencairan	September-November 2009	Februari-Desember 2010
2.	Penerima	32 Orang	65 Orang
3.	Jenis Usaha (penggunaan)	5 Jenis Usaha : 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian	5 Jenis Usaha : 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian
4.	Jumlah Pencairan	Rp.100.000.000,-	Rp. 253.690.000,-

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2010.

## REKAPITULASI PERKEMBANGAN USAHA PUAP KOTA PADANG

Bulan : Dec-10

No	Gapoktan	Penelitian (orang)												Penyuluran (Rp 000)												Pengembalian (orang)												Perkembangan Kegiatan Agribisnis (Rp 000)												Ket.
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																
Tahun 2008		22	2	1	3	2	39	10	79	31,000	2,000	3,500	4,000	6,000	119,760	10,000	176,240	20	2	1	3	2	28	10	76	15,224	555	1,970	542	2,648	50,692	1,500	73,091																	
1	Aygo Floris	51	7	10	80	148	36,500	8,500	12,000	118,500	195,590	43	6	10	72	131	38,550	4,750	6,450	55,700	105,550																													
2	Batu Gadang Bersama	30	5	6	5	5	41,600	5,000	18,000	28,500	10,000	10,000	10,000	28,500	10,000	10,100	13	3	4	4	4	5	29	17,645	3,240	6,210	10,000	42,700																						
3	Hutanpan Bersama	28	2	8	13	9	64,970	36,600	30,260	86,400	10,000	228,190	28	8	13	9	1	59	38,217,5	60,040	10,450	159,941	43,000																											
4	Hutanpan Bunda	135	3	1	10	11	174,850	156	25,550	206,406	15,000	26,000	21,000	18,000	16,000	0	0	78,713	19,413	94,126	75,400																													
5	Hutanpan Jaya	41	8	8	4	7	94,000	16,000	26,000	21,000	18,000	175,906	23	5	1	2	31	4,015	36,950	17,765	14,035	2,540	2,850	4,787	4,787	3,000	24,552																							
6	Jaya Bersama	60	1	2	11	3	53,750	4,000	7,000	25,000	15,000	103,750	8	11	1	20	68	11,590	14,035	2,540	2,850	4,030	10,410	170	71,855																									
7	Sepakat	20	14	5	38	82	45,500	25,500	8,000	77,000	163,000	15	13	2	4	24	68	11,590	14,035	2,540	2,850	4,030	10,410	170	71,855																									
8	Cupuk Sepakat	24	2	3	1	9	41	60,500	3,000	8,000	2,000	34,000	8,000	115,500	24	2	37	22,014,5	340	225	10,410	170	5,129	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																						
9	Kepalo Koto Basamo	41	2	2	45	39,680	4,000	2,000	60,500	19	50,500	2	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																											
10	Mulang Sakoto	19	1	7	5	8	54,500	2,000	12,500	12,000	12,000	87,500	3	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																										
11	Psiang Sakoto	33	1	7	5	8	54,500	2,000	12,500	12,000	12,000	87,500	3	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																										
12	Sarik Sari	39	136	175	98,200	127	29,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
13	Samudra Bendi	36	3	6	4	26	42,500	6,000	22,000	7,200	45,000	122,706	31	1	14	46	18,357	4,855	1,000	21,512	21,512	33,889	7,050																											
14	Sungai Sajoed Jaya	38	3	3	19	60	43,500	8,000	22,000	7,200	45,000	116,500	31	1	14	46	18,357	4,855	1,000	21,512	21,512	33,889	7,050																											
15	Sepihara	75	8	6	7	96	100,095	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																							
16	Tigo Sarungpan	768	48	5	75	43	1215,845	76,000	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																						
17	Total	768	48	5	75	43	1215,845	76,000	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																						

No	Gapoktan	Penelitian (orang)												Penyuluran (Rp 000)												Pengembalian (orang)												Perkembangan Kegiatan Agribisnis (Rp 000)												Ket.
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	Jlh																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																
Tahun 2009		27	5	1	2	35	42,750	14,500	1,500	3,000	61,750	23	5	1	2	31	4,015	1,430	155	660	6,270																													
1	Ambueang Sakoto	60	60	112,450	60	112,450	60	112,450	60	112,450	35	35	35,950	17,765	14,035	2,540	2,850	4,787	4,787	3,000	24,552																													
2	Cao Puli	20	1	2	11	3	53,750	4,000	7,000	25,000	15,000	103,750	8	11	1	20	68	11,590	14,035	2,540	2,850	4,030	10,410	170	71,855																									
3	Cupuk Sepakat	20	14	5	38	82	45,500	25,500	8,000	77,000	163,000	15	13	2	4	24	68	11,590	14,035	2,540	2,850	4,030	10,410	170	71,855																									
4	Fajar Malakita	24	2	3	1	9	41	60,500	3,000	8,000	2,000	34,000	8,000	115,500	24	2	37	22,014,5	340	225	10,410	170	5,129	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																						
5	Kepalo Koto Basamo	41	2	2	45	39,680	4,000	2,000	60,500	19	50,500	2	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																											
6	Mulang Sakoto	19	1	7	5	8	54,500	2,000	12,500	12,000	12,000	87,500	3	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																										
7	Psiang Sakoto	33	1	7	5	8	54,500	2,000	12,500	12,000	12,000	87,500	3	3	4	3	13	1,750	1,800	1,800	3,100	3,100	106,895	136,745																										
8	Sarik Sari	39	136	175	98,200	127	29,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
9	Samudra Bendi	36	3	6	4	26	42,500	6,000	22,000	7,200	45,000	122,706	31	1	14	46	18,357	4,855	1,000	21,512	21,512	33,889	7,050																											
10	Sungai Sajoed Jaya	38	3	3	19	60	43,500	8,000	22,000	7,200	45,000	116,500	31	1	14	46	18,357	4,855	1,000	21,512	21,512	33,889	7,050																											
11	Sepihara	75	8	6	7	96	100,095	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																							
12	Tigo Sarungpan	768	48	5	75	43	1215,845	76,000	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																						
13	Total	768	48	5	75	43	1215,845	76,000	11,500	170,600	84,960	822,710	58,500	5,503	112,085	45	6	4	5	60	344,645	23,978,4	2,930,0	47,784,0	28,699,5	399,004,0	25,965,0	988,377,0																						

Ket.:

- 1.1 (Tanaman Pangan)  
 1.2 (Tanaman Hortikultura)  
 1.3 (Tanaman Perkebunan)  
 1.4 (Perikanan)

- 2.1 (Industri Rumah Tangga Pertanian)  
 2.2 (Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro)  
 2.3 (Usaha Lain Berbasis Pertanian)

Padang, Januari 2011

Pengetik: Mitra Tani



SYARIFUDDIN, SP

Lampiran 6. Identitas dan aktivitas responden anggota LKM-A

No.	Nama/Poktan	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jenis Usaha	Jumlah dana yang dipinjam (Rp)	Waktu Meminjam	Waktu Pengembalian
I	Saiyo Sakato						
	1. Irwan	46	SMP	Padi sawah	2.020.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	2. Syamsudin	51	DIII	Padi sawah	2.020.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	3. Nurabidin	41	SMA	Industri RT	2.020.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	4. Amrizal	39	SMA	Pemasaran	9.400.000,-	08-02-2010	08-08-2010
	5. Azhar	54	SLTP	Padi sawah	1.010.000,-	18-03-2010	18-07-2010
	6. Kandri	40	SMA	Padi sawah	1.010.000,-	17-06-2010	17-10-2010
	7. Zarni	52	SD	Padi sawah	3.000.000,-	21-06-2010	21-10-2010
8. Nurdin Pondek	59	SLTP	Peternakan	5.000.000,-	24-06-2010	24-10-2010	
II	Kandang Batu Sakato						
	1. Jainuddin	35	Strata I	Pemasaran	9.400.000,-	08-02-2010	08-08-2010
	2. Ernimah	42	SLTP	Industri RT	2.000.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	3. Afrianis	31	SMA	Padi sawah	2.020.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	4. Khairudin	47	DIII	Padi Sawah	2.020.000,-	18-03-2010	18-07-2010
	5. Syafril	39	SLTP	Peternakan	5.000.000,-	18-03-2010	18-07-2010
6. Suardi	44	SLTP	Padi sawah	2.020.000,-	18-03-2010	18-07-2010	
III	Kampung Kalawi Timur						
	1. Dermawan	37	SLTP	Peternakan	9.400.000,-	08-02-2010	08-08-2010
	2. Sutrisno	48	SD	Peternakan	5.000.000,-	08-02-2010	08-06-2010
	3. Yusri Muncak	57	SMA	Padi Sawah	2.020.000,-	11-02-2010	11-06-2010

## Lampiran 7. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A.

## A. Standar perhitungan penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan aspek Permodalan

Table 1. Standar perhitungan Rasio Modal sendiri terhadap total asset dan standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$\leq 0$	0	6	0
$0 < X < 10$	10	6	0.6
$10 < X < 20$	20	6	1.2
$20 < X < 30$	30	6	1.8
$30 < X < 40$	40	6	2.4
$40 < X < 50$	50	6	3.0
$50 < X < 60$	60	6	3.6
$60 < X < 70$	70	6	4.2
$70 < X < 80$	80	6	4.8
$80 < X < 90$	90	6	5.4
$90 < X < 100$	100	6	6.0

Tabel 2. Standar perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 4$	0	3	0.00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
$> 8$	100	3	3.00

Tabel 3. Penentuan Bobot pengukuran resiko Komponen Modal dan Aktiva

No.	Komponen	Bobot Pengakuan resiko(%)
1.	Simpanan Pokok	100
2.	Simpanan Wajib	100
3.	Modal Penyertaan	50
4.	Cadangan Umum	100
5.	Modal Sumbangan	100
6.	SHU belum dibagi	50
7.	Cadangan Tujuan Resiko	50
8.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	100
9.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota	100
10.	Kas/Bank	0
11.	Tabungan dan simpanan berjangka	20
12.	Surat-surat berharga	50
13.	Pendapatan yang masih harus diterima	50
14.	Aktiva tetap	70

Sumber : Permeneg KUKM, 2008

B. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Aktiva Produktif

Table 1. Standar perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota total pinjaman diberikan.

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0.00
$25 < X \leq 50$	50	10	5.00
$50 < X \leq 75$	75	10	7.50
$> 75$	100	10	10.00

Tabel 2. Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 45$	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 45$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
$= 0$	100	5	5.0

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X \leq 10$	10	5	0.5
$10 < X \leq 20$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	30	5	1.5
$30 < X \leq 40$	40	5	2.0
$40 < X \leq 50$	50	5	2.5
$50 < X \leq 60$	60	5	3.0
$60 < X \leq 70$	70	5	3.5
$70 < X \leq 80$	80	5	4.0
$80 < X \leq 90$	90	5	4.5
$90 < X \leq 100$	100	5	5.0

Table 4. Standar Perhitungan BMPP

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	100	5	5
$> 25$	0	5	0

Sumber : Permeneg KUKM, 2008

C. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A Berdasarkan Aspek Manajemen

Tabel 1. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75
8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Tabel 2. Standar Perhitungan Manajemen Kelambagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Tabel 3. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Tabel 4. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50
6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.00

Tabel 5. Standar Perhitungan Manajemen Liquiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber : Permeneg KUKM 2008.

## D. Standar Perhitungan Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Efisiensi

Tabel 1. Standar perhitungan rasio biaya operasional atas partisipasi bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$85 \leq X < 100$	50	4	2
$70 \leq X < 85$	75	4	3
$0 \leq X < 70$	100	4	4

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Aktiva terhadap Total Asset

Rasio aktiva tetap terhadap total asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$75 \leq X < 100$	25	4	1
$50 \leq X < 75$	50	4	2
$25 \leq X < 50$	75	4	3
$0 \leq X < 25$	100	4	4

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	100	2	2.0
$5 < X \leq 10$	75	2	1.5
$10 < X \leq 15$	50	2	1.0
$> 15$	0	2	0.0

Sumber : Permeneg KUKM, 2008

E. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Liquiditas

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	10	0
$100 < X \leq 125$	50	10	5
$125 < X \leq 150$	100	10	10
$>150$	0	10	10

Tabel 2. Standar perhitungan rasio pinjaman terhadap dana yang diterima.

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$X \leq 100$	25	5	1.25
$100 < X \leq 200$	50	5	2.50
$200 < X \leq 300$	75	5	3.75
$>300$	100	5	5

Sumber : Permeneg KUKM, 2008

F. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.

Tabel 1. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset.

Rasio Rentabilitas Aset	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0.75
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
$> 10$	100	3	3.00

Tabel 2. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Ratio Rentabilitas Ekuitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	25	3	0.75
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
$> 10$	100	3	3.00

Tabel 3. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	0	0
$> 100$	100	4	4

Sumber : Permeneg KUKM, 2008

G. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Jatidiri LKM-A

Tabel 1. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

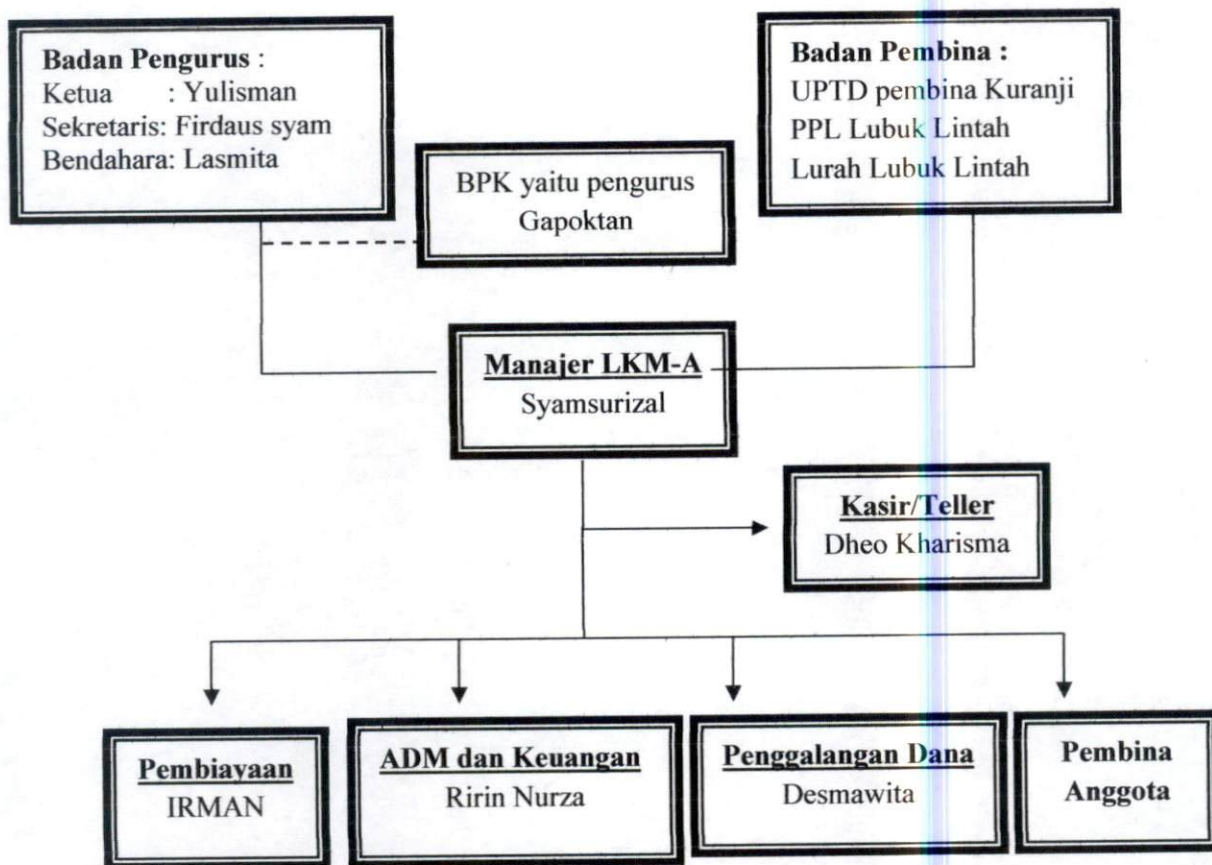
Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	0	7	0.00
$25 \leq X < 75$	50	7	3.50
$50 \leq X < 75$	75	7	5.25
$\geq 75$	100	7	7

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5$	0	3	0.00
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
$> 10$	100	3	3

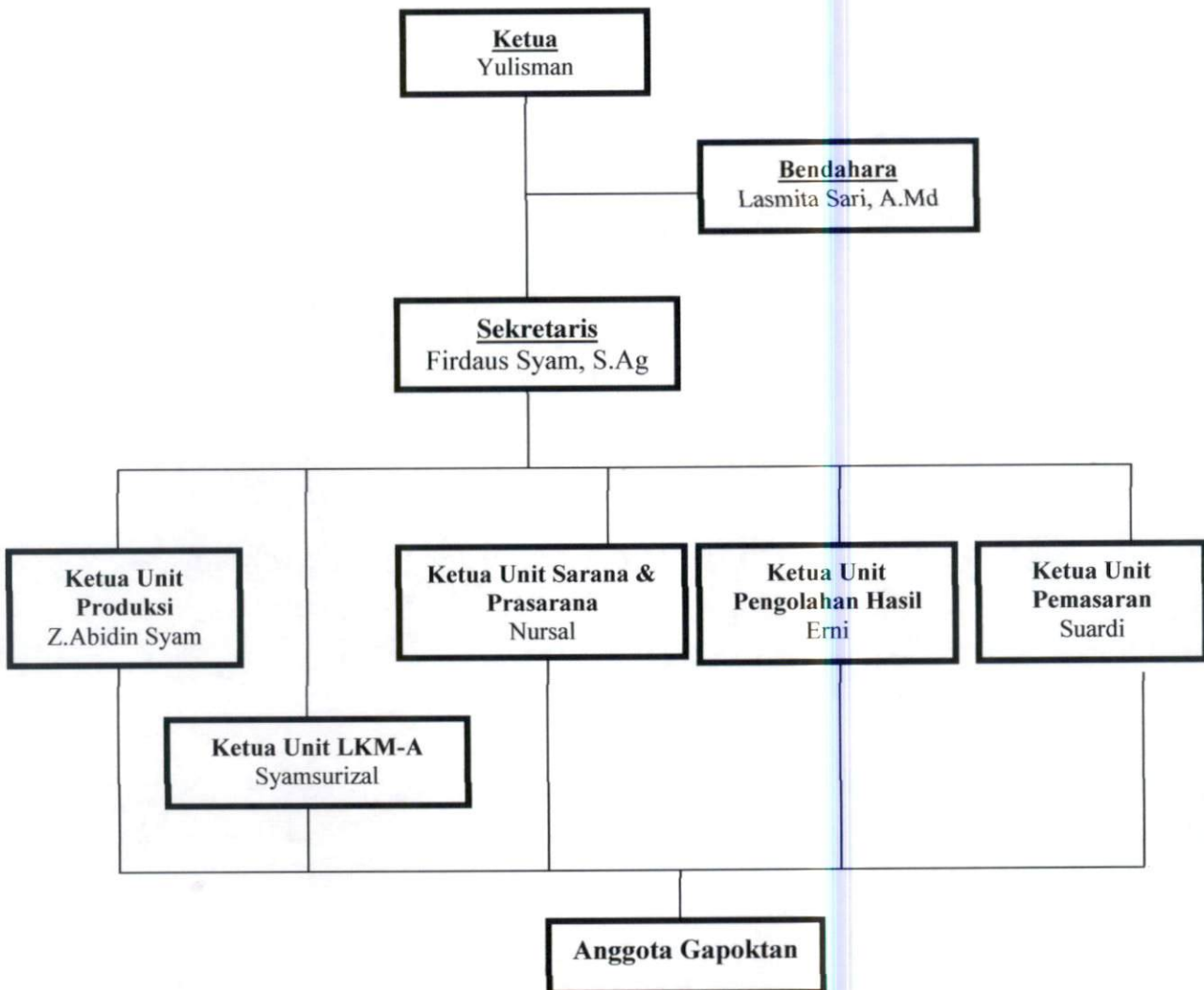
Sumber : Permenneq KUKM, 2008.

Lampiran 8. Struktur Pengelola LKM-A Harapan Bundo



Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011.

Lampiran 9. Struktur Organisasi Gapoktan Harapan Bundo.



Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 10 : Daftar Hasil pertanyaan Penelitian Aspek Manajemen

No.	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
I.	Manajemen Umum		
	1.1 Apakah LKM-A memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis).	1	Ya
	1.2 Apakah LKM-A telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan LKM-A dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	Ya
	1.3 Apakah LKM-A memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	Ya
	1.4 Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	Ya
	1.5 Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	Ya
	1.6 Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	Ya
	1.7 Pengurus dan atau pengelola LKM-A memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	Ya
	1.8 LKM-A memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	Tidak
	1.9 Pengurus LKM-A yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan LKM-A (dilakukan	9	Tidak

	<p>konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)</p> <p>1.10 Anggota LKM-A sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan LKM-A sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)</p> <p>1.11 Pengurus, Pengawas, dan Pengelola LKM-A di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan LKM-A (konfirmasi dengan mitra kerja)</p> <p>1.12 Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)</p>	<p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>	<p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p>
II.	<p>Kelembagaan</p> <p>2.1 Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan LKM-A dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)</p> <p>2.2 LKM-A memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)</p> <p>2.3 Di dalam struktur kelembagaan LKM-A terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)</p> <p>2.4 LKM-A terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP LKM-A)</p> <p>2.5 LKM-A telah menjalankan kegiatannya</p>	<p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p>	<p>Ya</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p>

	sesuai SOM dan SOP LKM-A. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)		
	2.6 LKM-A mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpananya)	17	Ya
		18	Ya
III.	Permodalan		
	3.1 Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	19	Tidak
	3.2 Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	20	Tidak
	3.3 Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	Tidak
	3.4 Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	Tidak
	3.5 Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri. (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	Ya
IV.	Aktiva		
	4.1 Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan. (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	Ya
	4.2 Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	Tidak
	4.3 Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman)	26	Tidak

	<p>dan cadangan penghapusan pinjaman)</p> <p>4.4 Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)</p> <p>4.5 LKM-A menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)</p> <p>4.6 Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah. (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)</p> <p>4.7 Dalam memberikan pinjaman LKM-A mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)</p> <p>4.8 Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite).</p> <p>4.9 Setelah pinjaman diberikan LKM-A melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)</p> <p>4.10 LKM-A melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)</p>	<p>27</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p>	<p>Ya</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p>
V.	<p>Liquiditas</p> <p>5.1 Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)</p> <p>5.2 Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya).</p> <p>5.3 Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang</p>	<p>34</p> <p>35</p>	<p>Tidak</p> <p>Ya</p>

	jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan LKM-A. (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).	37	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	Ya

Harta/Aktiva		Hutang dan Modal/ Kekayaan Bersih	
Harta/Aktiva Lancar		Hutang/Kewajiban Lancar	
Kas	Rp. 10.690.292,-	Hutang	
Dana Titipan	Rp. -		
Bank	Rp. 1.369.383		
Pembiayaan	Rp. 90.802.500,-		
Jumlah Aktiva Lancar	Rp.102.862.175,-	Modal/Kekayaan	
Harta/Aktiva Tetap		Modal saham	
Komputer	Rp.5.000.000,-	Simpanan Pokok	
Mobiler	Rp.1.890.000,-	Simpanan Wajib	
Jumlah Aktiva Tetap	Rp.6.890.000,-	Simpanan Tabungan	
		Modal PUAP	
		Jumlah Modal	Rp.106.660.275,-
		Laba/Rugi	Rp. 3.091.900,-
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>Rp.109.752.175,-</b>	<b>JUMLAH FASIVA</b>	<b>Rp.109.752.175,-</b>



Syamsurizal

Lubuk Lintah 31 Desember 2010  
 Dibuat oleh  
 Bagian Adm dan Pembukuan

*(Signature)*  
 Dheo Kharisma

## Lampiran 12. Keadaan Modal LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2010

No.	Sumber Modal	Jumlah (Rp)	Persentase (%) dari Keseluruhan Modal
1.	Simpanan pokok	2.138.000,-	1,87%
2.	Simpanan wajib	3.080.000,-	2,88%
3.	Simpanan tabungan	1.580.275	1,48%
4.	Modal PUAP	100.000.000,-	93,77%
	Jumlah	108.522.000,-	100%

Sumber : Laporan Tahunan LKM-A Harapan Bundo, 2010

## Lampiran 13 . Jumlah anggota LKM-A Harapan Bundo Menurut Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah Anggota (Orang)	Persentase (%)
1.	Tanaman Padi Sawah	15	46,88%
2.	Peternakan	5	15,62%
3.	Pemasaran	4	12,5%
4.	Industri Rumah Tangga	8	25%
	Jumlah	31	100%

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 14. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Harapan Bundo

**RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) PUAP**

Nama Gapoktan : Harapan Bundo  
 Tanggal Pengukuhan : 7 Januari 2008  
 Pengurus Gapoktan  
     Ketua : Yulisman  
     Sekretaris : Firdaus Syam  
     Bendahara : Lasmita Sari  
 No.Rekening Gapoktan : 5468-01-007015-53-8  
 Nama Cabang Bank : BRI 5468 Unit Kuranji Cabang Padang  
 Alamat Bank : Jln.M.Yunus. Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Kota Padang

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, RT, Ekor)	Nilai (Rp)
I.	Budidaya (Non-farm)		
	1.1 Tanaman Pangan	13,5 Ha	27.105.000,-
	1.2 Holtikultura	0,5 Ha	1.350.000,-
	1.3 Peternakan	513 Ekor	17.900.000,-
	1.4 Perkebunan	-	-
II.	Non Budidaya (Off-Farm)		
	1.1 Industri RT Pertanian	4 RT	6.645.000,-
	1.2 Pemasaran Hasil Pertanian	5 RT	47.000.000,-
	1.3 Usaha Lain Berbasis Pertanian		
	Total		100.000.000,-

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 15. Rencana Usaha Kelompok Saiyo Sakato

No.	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, bks, Krg, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Firdaus	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
2.	Amrizal	Pemasaran Padi	2.2	30 Krg	5.640.000,-	Agustus 09
3.	Irman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
4.	Yunimar	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
5.	Ridwan	Padi sawah	1.1	0,5 Ha	1.010.000,-	Agustus 09
6.	yulisman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
7.	Nasril	Padi Sawah	1.1	0,5 Ha	1.010.000,-	Agustus 09
8.	Ahmad	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
9.	Herman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
10.	Nursal	Padi sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
11.	Nofrisal	Holtilkultura	1.2	0,5 Ha	1.170.000,-	Agustus 09
12.	Musda fiardi	Itik Petelur	1.3	100 ekor	5.410.000,-	Agustus 09
13.	Syam surizal	Pemasaran Padi	2.2	50 Krg	9.400.000,-	Agustus 09
14.	Z.Dahlan	Industri RT	2.1	1.000 bks	500.000,-	Agustus 09
15.	Zamhar	Industri RT	2.1	2.500 bks	2.000.000,-	Agustus 09
	Total				40.280.000,-	

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 16. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Poktan Kandang Batu Sakato

No.	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, bks, Krg, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Maifriadi	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.015.000,-	Agustus 09
2.	Aprianis	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.015.000,-	Agustus 09
3.	Syafri	Padi Sawah	1.1	1,5 Ha	2.771.000,-	Agustus 09
4.	Lasmita	T.Kambing	1.3	3 ekor	2.400.000,-	Agustus 09
5.	Z.Asyam	T.Kambing	1.3	4 ekor	3.500.000,-	Agustus 09
6.	Jasmita	T.Kambing	1.3	3 ekor	2.400.000,-	Agustus 09
7.	Nurhaida	T.Kambing	1.3	3 ekor	2.400.000,-	Agustus 09
8.	Erni	Industri RT	2.1	2.500 bks	2.000.000,-	Agustus 09
9.	Zarni	Industri RT	2.1	1575 prg	1.260.000,-	Agustus 09
10.	Suardi	Pemasaran Padi	2.2	50 krg	9.400.000,-	Agustus 09
11.	Jamaris	Pemasaran Padi	2.2	50 krg	9.400.000,-	Agustus 09
	Total				39.665.000,-	

Sumber :Gapoktan Harapan Bundo, 2011.

## Lampiran 17. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Poktan Kampung Kalawi Timur

No.	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha, bks, Krg, Ekor)	Nilai (Rp)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
1.	Desmawati	Pemasaran Padi	2.2	50 krg	9.400.000,-	Agustus 09
2.	Syamsudin	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
3.	Y.Muncak	Padi Sawah	1.1	1,5 Ha	3.030.000,-	Agustus 09
4.	N.Sumarni	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 09
5.	Sutrisno	Ayam Potong	1.3	200 ekor	2.200.000,-	Agustus 09
6.	Mardiana	Industri RT	2.1	1.730 bks	1.385.000,-	Agustus 09
	Total				20.055.000,-	

Sumber :Gapoktan Harapan Bundo. 2011

## Lampiran 18. Contoh Surat Rekomendasi Anggota LKM-A

**SURAT REKOMENDASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
 Taggal lahir :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 No.Identitas :  
 Suku :

Dalam hal ini selaku ketua kelompok tani..... telah memberikan persetujuan kepada anggota kami yaitu :

Nama :  
 Tanggal lahir :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 No.Identitas :  
 Suku :

Untuk mengadakan pembiayaan/pinjaman kepada LKM-A "Harapan Bundo". Bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari anggota kami. Maka kami bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya.

Dengan surat rekomendasi dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Lintah,.....20...

Yang menerima rekomendasi

Yang membuat rekomendasi  
 Ketua Poktan.....

(.....)

(.....)

Mengetahui  
 Ketua Gapoktan Harapan Bundo

(.....)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 19. Contoh Data Permohonan Pembiayaan Anggota LKM-A

**DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Bismillahirrahmanirrahim

## A.Data Pribadi

1. Nama : .....
2. Agama : .....
3. Tempat/Tgl lahir : .....
- 4.Pendidikan terakhir : .....
- 5.Alamat lengkap : .....
- 6.Status rumah : .....
- 7.Jama'ah Mesjid : .....
- 8>Nama suami/istri : .....

## B.Data Usaha

- 1.Jenis usaha : .....
- 2.Tempat usaha : .....
- 3.Modal usaha : .....
- 4.Modal sekarang : .....

## C.Bantuan

- 1.Jenis bantuan : .....
- 2.Besar pinjaman : .....
- 3.Dipergunakan : .....

## D.Kesanggupan Mengangsur

Sanggup mengangsur sesuai dengan tanggal yang disepakati

(sanggup/tidak)

## E.Sumber pelunasan

- 1.Gaji : .....
- 2.Jangka waktu : .....
- 3.Dipergunakan : .....

F.Tanggal pengajuan : .....

G.Yang menerima : .....

Lubuk Lintah,.....,20...

Pihak Penanggung

Yang Mengajukan

(.....)

(.....)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 20. Contoh Surat Persetujuan

**SURAT PERSETUJUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....

Tanggal lahir : .....

Alamat : .....

No. Identitas : .....

Status : .....

Telah memberikan persetujuan kepada suami/istri/anak/saudara :

Nama : .....

Tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Status : .....

Untuk mengadakan pembiayaan/pinjaman kepada LKM-A "Harapan Bundo". Bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari istri/suami/anak/saudara kami, maka kami bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Demikianlah surat persetujuan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk lintah.....,20..

Yang menerima persetujuan

Yang membuat Persetujuan

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Ketua LKM-A

(.....)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011

## Lampiran 21. Contoh Rencana Usaha Anggota (RUA)

**RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)**

1. Nama Anggota : .....
2. Tempat/Tanggal lahir : .....
3. Alamat : .....
4. Nama Poktan : .....
5. Rencana Usaha : .....

  - a. Jenis usaha produktif : .....
  - b. Kode usaha produktif : .....
  - c. Volume (Ha, ekor, bks) : .....
  - d. Kebutuhan biaya : .....
  - e. Jadwal permintaan : .....

Lubuk  
Lintah,.....  
.20..

Mengetahui  
Ketua Kelompok Tani

(.....)

Yang mengusulkan

(.....)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011.

## Lampiran 22. Contoh Lampiran Usaha Anggota

**LAMPIRAN**  
**RENCANA USAHA ANGGOTA**

Nama Anggota : .....

Jenis Usaha : .....

Volume : .....

Kebutuhan Biaya : .....

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah

Lubuk Lintah,.....20....

Anggota yang mengusulkan

(.....)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2011.

**Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Harapan Bundo**  
**Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang**  
**Periode Desember 2010**

**I. Pendapatan**

i.	Pendapatan Bunga Bank	Rp.-	
ii.	Pendapatan Penjualan Saham	Rp.-	
iii.	Pendapatan pembiayaan	Rp.-	
iv.	Pendapatan ADM	Rp. 1.875.000,-	
v.	Pendapatan Operasional	Rp.15.747.800,-	
vi.	Pendapatan ADM Saham	Rp.-	
vii.	Pendapatan ADM anggota Keluar	Rp.-	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>Rp.17.622.800,-</b>

**II. Beban-beban**

i.	Beban Tenaga kerja	Rp.2.900.000,-	
ii.	Beban Listrik	Rp.-	
iii.	Beban Perlengkapan	Rp.9.536.900,-	
iv.	Beban ADM /ATK	Rp.-	
v.	Beban Penyusutan Komputer	Rp.-	
vi.	Beban Sewa Gedung	Rp.-	
vii.	Biaya Pakaian Dinas	Rp. 628.000,-	
viii.	Beban Konsumsi	<u>Rp.1.644.000,-</u>	
			<u><b>Rp.14.530.900,-</b></u>
			<b>Rp. 3.091.900,-</b>



Laba/Rugi

Diketahui

Manajer LKM-A

Syamsurizal

dibuat oleh  
Bagian ADM dan Pembukuan

Dheo Kharisma

**Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Harapan Bundo**  
**Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang**  
**POSISI KEKAYAAN/MODAL BERSIH**  
**Per 31 Desember 2010**

Saldo Kekayaan Awal Bulan		Rp.102.862.175,-
Ditambah (+)		
Berasal dari		
Simpanan Pokok	Rp.2.000.000,-	
Simpanan Wajib	Rp.3.080.000,-	
Sisa Hasil Usaha	Rp.3.091.900,-	Rp.8.171.900,-
Dikurangi (-)		
Simpanan Pokok (anggota Keluar)	Rp.-	
Koreksi Cadangan	Rp.-	
	Rp.	
Saldo Kekayaan Bersih Akhir Bulan		Rp.111.034.075,-

Diketahui  
 Manager LKM-A



Kel.Lubuk Lintah.Kec.Kuranji Kota Padang  
 Dibuat Oleh:  
 Bag.Adm.dan Pembukuan

Dheo Kharisma

**Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)**  
**Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Harapan Bundo**  
**Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang**  
**Tahun 2010**

---

Sisa Hasil Usaha	Rp.3.091.900,-
1. 5% saham	Rp. 154.595,-
2. 10% Gapoktan	Rp. 309.190,-
3. 40% Pengelola	Rp.1.236.760,-
4. 10% tabungan	Rp. 309.190,-
5. 15% Cadangan	Rp. 463.785,-
6. 2% Nagari	Rp. 61.838,-
7. 16% Operasional	Rp. 494.704,-
8. 2% PPL/PMT	Rp. 61.838,-

Diketahui oleh  
Manajer LKM-A



Lubuk Lintah, 31 Desember 2010  
Dibuat oleh Bag.Adm dan Pembukuan

Dheo Kharisma

Disetujui Oleh  
Ketua Gapoktan Harapan Bundo



Yulisman Sp.



## Lampiran 27 : Penejelasan atas Bobot Penilaian Kinerja LKM-A

### I. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen

- a. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
- b. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

### II. Cara penilaian untuk memperoleh angka skor

#### 2.1. Permodalan

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- (3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

##### b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- (3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

##### c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri terhadap ATMR

- (1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan aktiva Tertimbang menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- (2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

- (3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- (4) Menghitung Nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva
- (5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

## 2.2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio antara rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan
- c. Rasio antara cadangan resiko dengan Pinjaman Bermasalah
- d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Pinjaman bermasalah terdiri dari:

- a) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

A. Pengembalian pinjaman dengan angsuran, yaitu :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan
- b. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan
- c. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih.

2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

- a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan
- b. Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

B. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

- a. Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
- b. Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

C. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi criteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

D. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan,
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan.

2.2.2. Rasio resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan Untuk memperoleh rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM) dengan:
  - a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan dengan rumus :

$$\frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

- Perhitungan penilaian :
  1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
  2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
  3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

2.2.3. Rasio Cadangan resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor.

2.2.4. BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya

BMPP (Batas Maksimum Pembelian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25 % dari total dana yang siap dipinjamkan dengan ketentuan terlampir.

### 2.3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP Koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut;

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan

- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan.

1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0.3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

#### 2.4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi LKM-A didasarkan pada (tiga) rasio yaitu:

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset
3. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar LKM-A mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

##### 2.4.1. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 85% hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 15% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

#### 2.4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara 75% hingga 100% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 lampiran 5.

#### 2.4.5. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor pelayanan (lihat tabel 3 lampiran 14).

#### 2.5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas LKM-A dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kas
2. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

Kewajiban lancar terdiri atas:

1. Simpanan
2. Simpanan berjangka

Pinjaman terdiri atas:

1. Pinjaman produktif
2. Pinjaman konsumtif
3. Pinjaman lain

Dana yang diterima terdiri atas:

1. Simpanan
2. Simpanan berjangka

### 2.5.1. Pengukuran Rasio kas ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih kecil dari 100% diberi nilai 0, untuk rasio antara 100% sampai dengan 125% diberi nilai 50, untuk rasio antara 25% hingga 150% diberi nilai 100 sedangkan untuk rasio lebih dari 150% diberi nilai 0
2. Nilai dikalikan dengan bobot 0% diperoleh skor penilaian.

### 2.5.2. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil sama dengan dari 100% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 100% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

### 2.6. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

#### 2.6.1. Rasio rentabilitas asset

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

#### 2.6.2. Rasio Rentabilitas Modal sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

### 2.6.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Sisa Hasil Usaha dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

### 2.7. Jati Diri LKM-A

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

#### 2.7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

#### 2.7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7.5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap

kenaikan rasio 2.5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

2. Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian.

### III. Penempatan Kesehatan LKM-A

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 s/d 2.7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan prediket tingkat kesehatan LKM-A yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Tujuan	Variabel/Topik Data	Indikator	Data dan Sumber Data	Alat ukur	Analisis data	Teknik Pengumpulan data
1	2	3	4	5	6	7
1. Mendeskripsikan Pengelolaan dana Program BLM PUAP di LKM-A Harapan Bundo	1. Profil LKM-A Harapan Bundo  2. Pelaksanaan Pengelolaan dana program BLM PUAP di LKM-A Harapan Bundo.	a. Gambaran Umum Wilayah Kerja LKM-A Harapan Bundo. b. Sejarah dan Tujuan ini. c. Organisasi d. Permodalan e. Keanggotaan f. Usaha, Produk dan Perkembangannya.  a. Rencana dan Realisasi dana kepada anggota b. Rencana dan realisasi penggunaan dana oleh anggota penerima c. Pencatatan dan pelaporan d. Perguliran dana.	Data Primer dan Sekunder dari Gapoktan Harapan Bundo.  Data Primer dan Sekunder dari Gapoktan dan LKM-A Harapan Bundo.		Deskriptif Kualitatif  Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Wawancara, kuestioner kepada Informan Kunci, dan studi kepustakaan.  Wawancara, kuestioner terhadap responden dan informan kunci, serta studi kepustakaan
1	2	3	4	5	6	7
2. Menganalisa Kinerja	1. Menganalisa	a. Permodalan	Data Primer	Pedoman penilaian kesehatan	Deskriptif	Wawancara,

yang dijalankan LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana PUAP	Kinerja LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola dana Program BLM PUAP	b. kualitas Aktiva c. Manajement d. Efisiensi e. Likuiditas f. Kemandirian dan g. Jatidiri LKM-A	dan Data Sekunder. Data bersumber dari LKM-A dan Gapoktan Harapan Bundo	koperasi (Permeneg KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008	Kualitatif dan Kuantitatif	kuestioner terhadap responden dan informan kunci, serta studi kepustakaan.
---	---	---	---	---	----------------------------	--